



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PETA PROSES BISNIS
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan struktur organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, serta prosedur kerja yang jelas dan terukur, maka diperlukan peta proses bisnis di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
2. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TENTANG PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini yang dimaksud dengan:

1. Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang selanjutnya disebut Setjen Wantannas adalah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
2. Input adalah sumber daya yang akan digunakan dalam suatu proses.
3. Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah input menjadi output.
4. Output adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu proses.
5. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
6. Rencana Garis Besar (RGB) adalah gambaran tentang uraian sistematika kegiatan dan rencana kegiatan yang meliputi perencanaan, penyiapan dan pelaksanaan kegiatan termasuk unsur-unsur SDM, anggaran, waktu pelaksanaannya.
7. *Round Table Discussion* (RTD) adalah forum diskusi yang membahas isu-isu aktual dan permasalahan yang berkembang terkait topik yang sudah mendapat persetujuan Sesjen Wantannas untuk ditelaah dan dikembangkan dengan melibatkan tiga jalur aspiratif (akademisi, praktisi, dan birokrasi) untuk menghasilkan saran tindak kebijakan yang komprehensif dan integral.
8. *Focus Group Discussion* (FGD) adalah diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah mengenai suatu isu atau permasalahan tertentu.
9. Kunjungan Kerja Dalam Negeri (KKDN) adalah serangkaian aktifitas yang diselenggarakan melalui forum diskusi antara Setjen Wantannas dengan pakar/narasumber daerah melalui kunjungan kerja daerah di Propinsi atau Kabupaten/Kota tertentu yang diperkirakan terdapat potensi permasalahan yang berakibat pada kondisi ketahanan nasional.
10. Kunjungan Kerja Luar Negeri (KKLN), adalah serangkaian aktifitas yang dilaksanakan melalui kunjungan kerja ke luar negeri dalam rangka *benchmarking* untuk pengembangan organisasi serta mencari potensi permasalahan yang berakibat pada kondisi ketahanan nasional.

11. Saran Tindak Kebijakan Strategis adalah suatu perumusan saran tindak yang diselenggarakan melalui proses RTD dan KKDN/KKLN dan/atau FGD guna mengatasi permasalahan krusial yang perlu segera mendapatkan pemecahan.
12. Saran Tindak Perkiraan Cepat (Kirpat) adalah suatu perumusan saran tindak yang diselenggarakan secara cepat dan tepat guna mengatasi permasalahan krusial mendesak yang perlu segera mendapatkan pemecahan.
13. Perumusan kebijakan hasil KKDN/KKLN adalah rancangan kebijakan hasil kunjungan kerja pada instansi pemerintah baik dalam negeri, luar negeri, dan swasta nasional melalui kegiatan KKDN/KKLN dimaksudkan dalam rangka pemecahan masalah strategis ketahanan nasional.
14. Kelompok Kerja (Pokja), adalah forum diskusi antara Setjen Wantannas dengan kelompok pakar/narasumber dan/atau pakar/narasumber untuk merencanakan, menyusun dan merumuskan suatu kegiatan guna menghasilkan identifikasi permasalahan yang dituangkan dalam *Term of Reference* (TOR) , yang merupakan acuan bagi pakar dalam menyumbangkan pikiran secara tertulis untuk mempertajam hasil rumusan kebijakan.
15. Kelompok Kerja Khusus (Pokjasus), adalah forum diskusi antara Kelompok Kerja Deputi dengan birokrat, pakar/narasumber untuk merumuskan suatu rancangan kebijakan strategis dari aspek kewenangan K/L sebagai pendalaman dari hasil Rakertas dan dilaksanakan secara intensif.
16. Rapat Kerja Terbatas (Rakertas) adalah forum diskusi antara Kelompok Kerja Deputi dengan kelompok pakar/narasumber dan/atau pakar/narasumber dari tiga jalur (aspiratif, akademik, dan empirik) untuk merumuskan suatu rancangan kebijakan strategis awal dalam forum yang lebih besar, berdasarkan TOR dan/atau produk kelompok kerja, hasil penugasan, hasil studi kasus dan/atau hasil kunjungan kerja dalam/luar negeri.
17. Rapat Perumusan Materi (Ramusmat) atau Uji 1, adalah forum diskusi antara Kelompok Kerja Deputi dengan pakar/narasumber yang dihadiri oleh Sesjen, Deputi, dan Sahli untuk merumuskan rancangan kebijakan strategis hasil pembahasan Rakertas dan Pokjasus, menjadi rancangan akhir berupa opsi pilihan rekomendasi untuk diajukan kepada Ketua Wantannas RI, setelah dibahas dalam Uji 2 dan Uji 3.
18. *Clearing House* (CH) atau Uji 2 adalah rapat pimpinan yang dipimpin oleh Sesjen Wantannas dan dihadiri oleh Deputi, Sahli, dan Tim Pokja untuk menentukan agar rancangan kebijakan strategis nasional dan saran tindak dapat diteruskan sebagai

produk akhir yang akan dilaporkan kepada Ketua Wantannas RI dan/atau dibahas dalam Pra Sidang Wantannas RI.

19. Pra Sidang Wantannas RI atau Uji 3 adalah forum yang dipimpin oleh Sesjen Wantannas dan dihadiri oleh Deputi, Sahli, dan Eselon 1 K/L Anggota Wantannas membahas hasil perumusan rancangan kebijakan dan strategi nasional untuk memutuskan dilanjutkan atau tidak dibahas dalam Sidang Wantannas RI yang dituangkan dalam risalah Pra Sidang Wantannas RI.
20. Sidang Wantannas RI adalah forum persidangan yang dipimpin oleh Presiden selaku Ketua Wantannas RI dan diikuti oleh Anggota Wantannas RI untuk membahas rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional dan menjamin keselamatan bangsa dan negara serta rancangan risiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun waktu tertentu dan pengalokasian sumber-sumber kekuatan bangsa dan negara dalam rangka merehabilitasi akibat dari risiko pembangunan.
21. Perumusan kebijakan strategis adalah pengembangan dan sintesis terhadap alternatif-alternatif pemecahan masalah yang bersifat komprehensif integral yang membahas permasalahan nasional dengan skala prioritas tinggi untuk menghasilkan rancangan kebijakan sebagai materi sidang Wantannas.
22. Perumusan kebijakan strategis siklis, adalah suatu perancangan kebijakan yang diselenggarakan secara berlanjut sesuai periode waktu tertentu berupa Telaahan Strategis Nasional (Telstranas), Apresiasi Strategis Nasional (Apstranas), Perkiraan Strategis Nasional (Kirstranas), Strategi Nasional (Stranas), Rencana Kontijensi Nasional (Renkonnas), dan Perkiraan Risiko Strategi Nasional (Kiristranas).
23. Perumusan kebijakan strategis dinamis, adalah suatu perancangan kebijakan yang diselenggarakan untuk pengembangan dan sintesis terhadap alternatif-alternatif pemecahan masalah yang bersifat komprehensif atas peristiwa/kejadian dan situasi/kondisi tertentu yang diperkirakan berpengaruh terhadap ketahanan nasional.
24. Rancangan kebijakan dan strategi nasional adalah hasil perumusan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional dan menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan, kesatuan, kelangsungan hidup bangsa dan negara.
25. Rancangan kebijakan risiko pembangunan nasional adalah proses penilaian tentang efektifitas hasil perkiraan risiko pembangunan nasional yang dihadapi untuk kurun waktu tertentu dan proses

pengerahan sumber-sumber kekuatan bangsa dan negara dalam rangka merehabilitasi akibat dari risiko pembangunan.

26. Penetapan kebijakan dan strategi nasional adalah keputusan Sidang Wantannas RI terhadap rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional dan menjamin keselamatan bangsa dan negara.
27. Penetapan risiko pembangunan nasional adalah keputusan Sidang Wantannas RI terhadap rancangan kebijakan risiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun waktu tertentu dan pengerahan sumber-sumber kekuatan bangsa dan negara dalam rangka merehabilitasi akibat dari risiko pembangunan.

Pasal 2

Penyusunan Peta Proses Bisnis merupakan acuan bagi Setjen Wantannas untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Pasal 3

Peta Proses Bisnis Setjen Wantannas terdiri atas:

1. Proses utama yaitu proses bisnis utama atas penyelenggaraan pencapaian tujuan organisasi Setjen Wantannas;
2. Proses pendukung yaitu proses yang mendukung proses utama; dan
3. Proses manajemen, yaitu proses pengelolaan operasional dari suatu sistem atau proses yang memastikan proses utama dan proses pendukung berjalan dengan baik.

Pasal 4

Penyusunan Peta Proses Bisnis Setjen Wantannas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Setjen Wantannas ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Setjen Wantannas ini mulai berlaku, segala peraturan pelaksanaan dari Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor SKEP-79/Sesjen/XII/2011 tentang Mekanisme dan Prosedur Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diubah dan diganti berdasarkan Peraturan Setjen Wantannas ini.

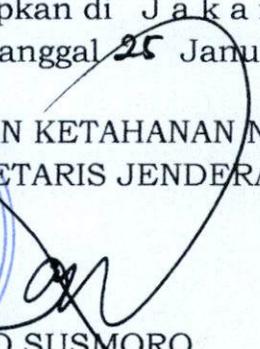
Pasal 6

Peraturan Setjen Wantannas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Januari 2022



DEWAN KETAHANAN NASIONAL RI
SEKRETARIS JENDERAL,

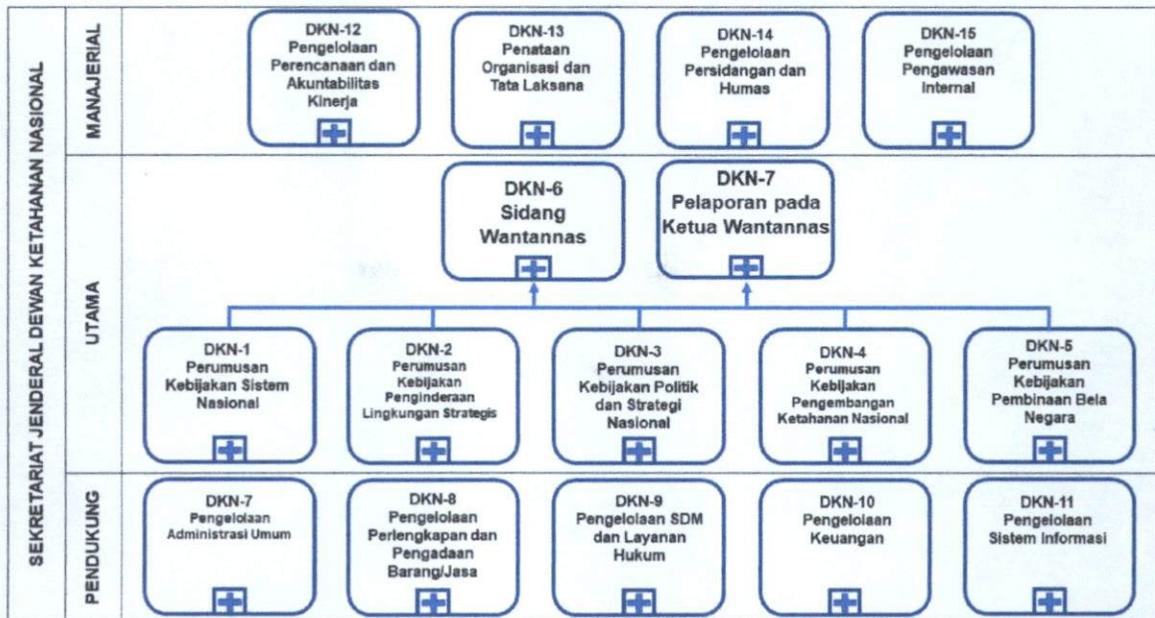

HARJO SUSMORO

LAMPIRAN
 PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL
 DEWAN KETAHANAN NASIONAL
 NOMOR 2 TAHUN 2022
 TENTANG PETA PROSES BISNIS
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
 DEWAN KETAHANAN NASIONAL

**PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN
 SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

Pemetaan proses bisnis didasarkan pada Organisasi dan Tata Kerja Setjen Wantannas dapat digambarkan sebagaimana peta proses bisnis level 0 tersebut dibawah ini:

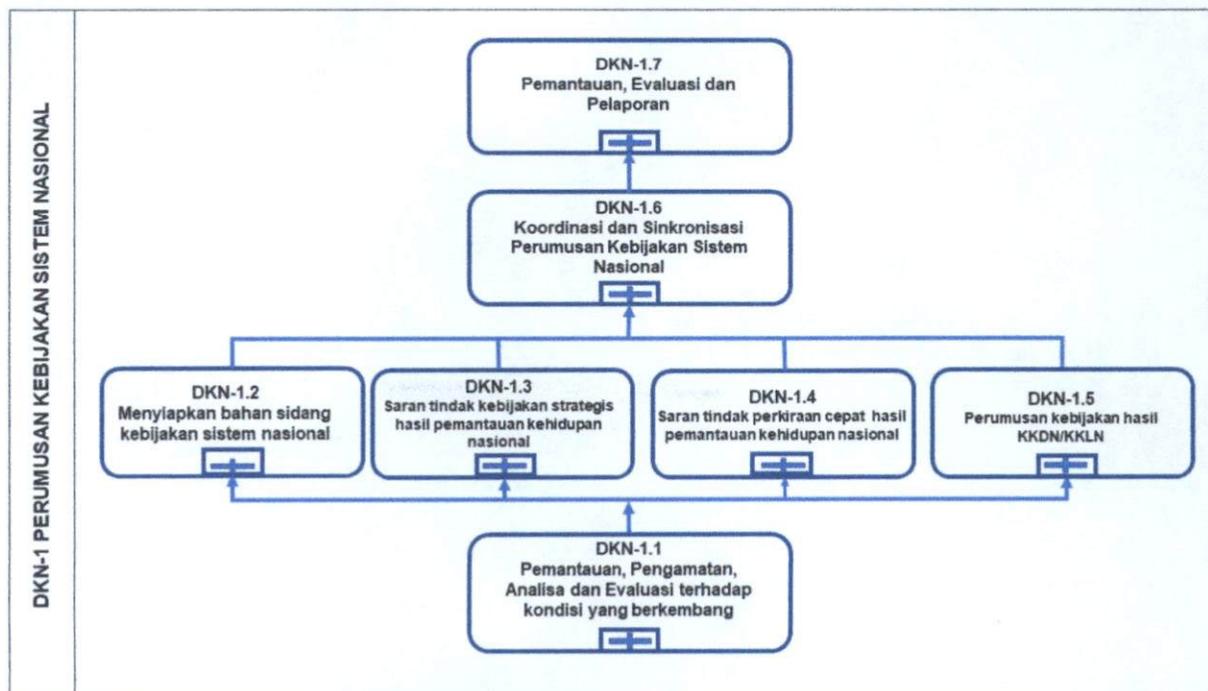
PETA PROSES BISNIS LEVEL 0 SETJEN WANTANNAS



Pemetaan proses bisnis Setjen Wantannas tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam sub proses bisnis level 1 Utama tersebut dibawah ini:

1. Sub Proses Bisnis Level 1 DKN-1 Perumusan Kebijakan Sistem Nasional

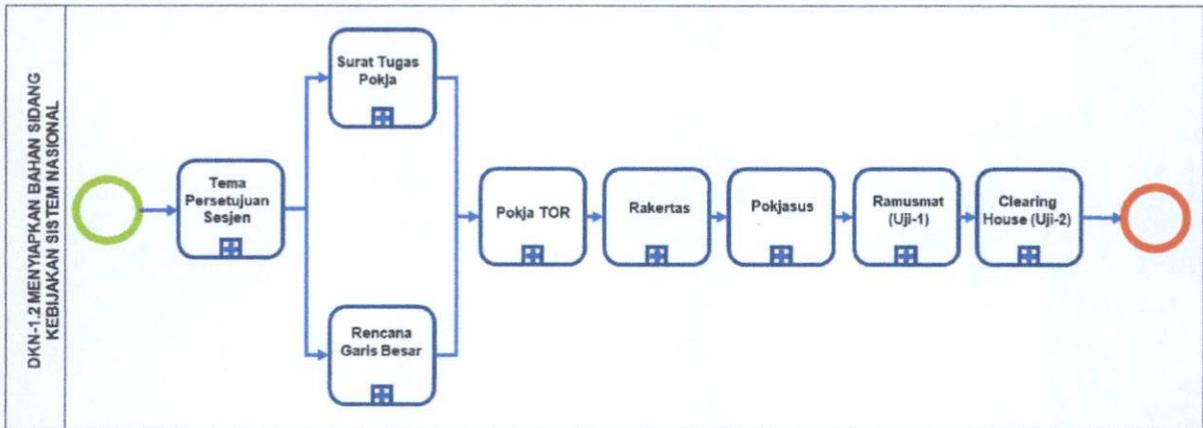
**SUB PROSES BISNIS LEVEL 1 DKN-1
 PERUMUSAN KEBIJAKAN SISTEM NASIONAL**



Pemetaan Sub Proses Bisnis Level 1 DKN-1 Perumusan Kebijakan Sistem Nasional tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam sub proses bisnis level 2 tersebut dibawah ini:

- a. Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-1.1 Pemantauan, pengamatan, analisa dan evaluasi terhadap kondisi yang berkembang.
Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-1.1 pemantauan, pengamatan, analisa dan evaluasi terhadap kondisi yang berkembang tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.
- b. Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-1.2 Menyiapkan bahan sidang kebijakan sistem nasional.

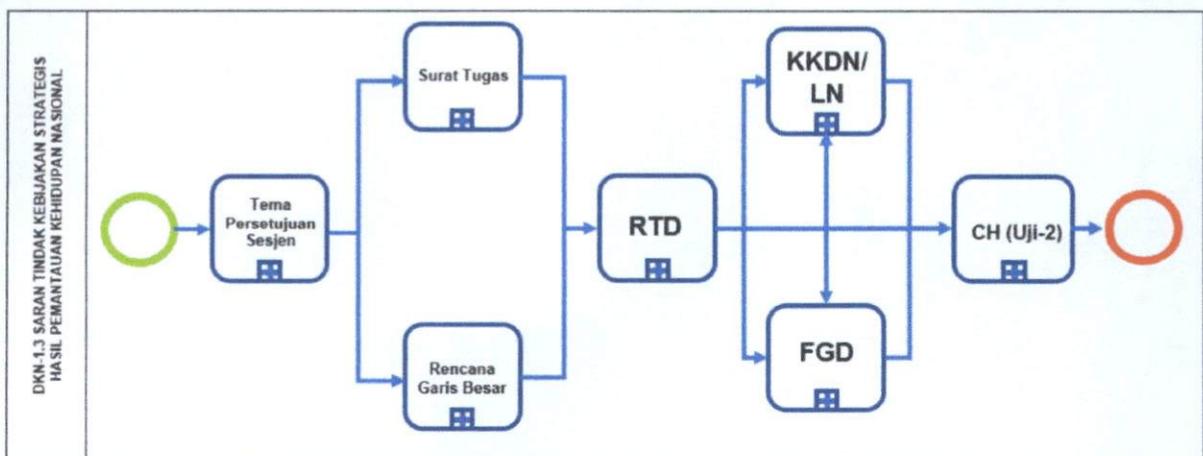
SUB PROSES BISNIS LEVEL 2 DKN-1.2 MENYIAPKAN BAHAN SIDANG KEBIJAKAN SISTEM NASIONAL



Masing-masing kegiatan dalam tahapan menyiapkan bahan sidang kebijakan sistem nasional tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

- c. Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-1.3 Saran tindak kebijakan strategis hasil pemantauan kehidupan nasional.

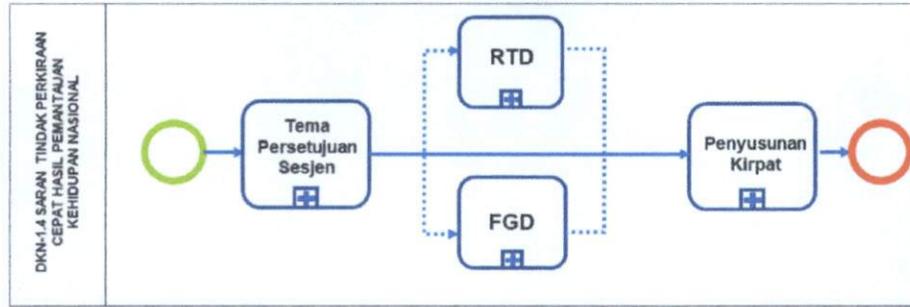
SUB PROSES BISNIS LEVEL 2 DKN-1.3 SARAN TINDAK KEBIJAKAN STRATEGIS HASIL PEMANTAUAN KEHIDUPAN NASIONAL



Masing-masing kegiatan dalam tahapan saran tindak kebijakan strategis hasil pemantauan kehidupan nasional tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

- d. Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-1.4 Saran tindak perkiraan cepat hasil pemantauan kehidupan nasional.

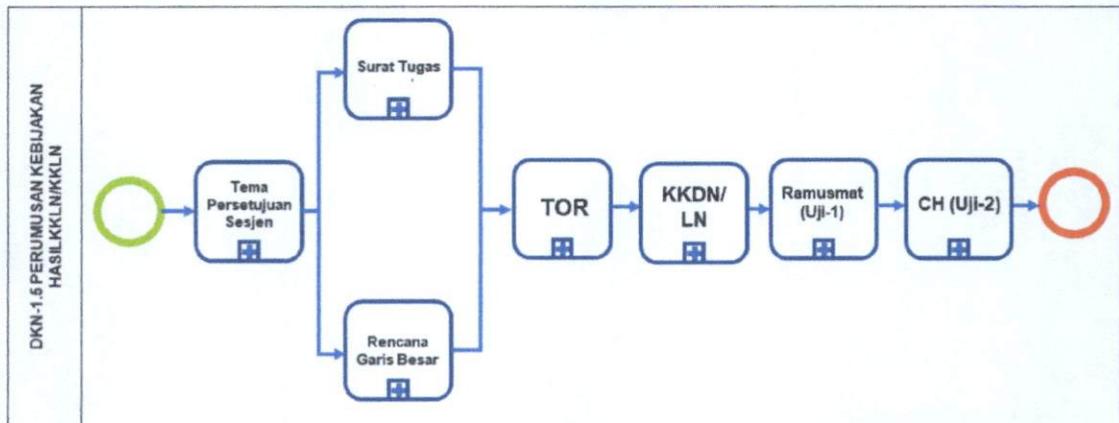
SUB PROSES BISNIS LEVEL 2 DKN-1.4 SARAN TINDAK PERKIRAAN CEPAT HASIL PEMANTAUAN KEHIDUPAN NASIONAL



Masing-masing kegiatan dalam tahapan saran tindak perkiraan cepat hasil pemantauan kehidupan nasional tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

- e. Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-1.5 Perumusan Kebijakan Hasil KKDN/KKLN

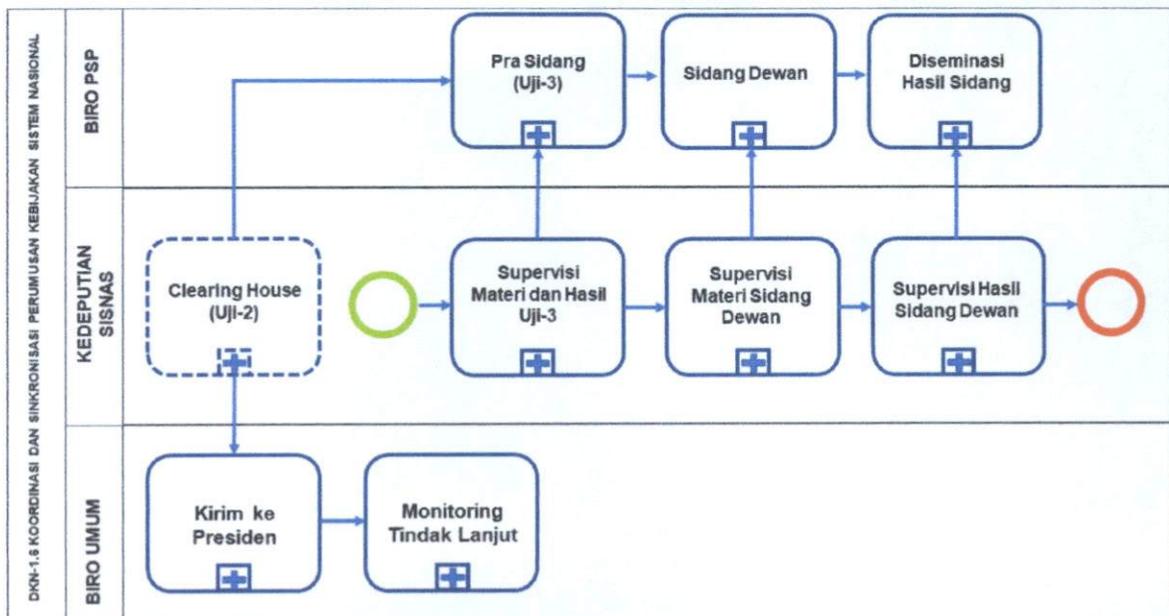
SUB PROSES BISNIS LEVEL 2 DKN-1.5 PERUMUSAN KEBIJAKAN HASIL KKDN/KKLN



Masing-masing kegiatan dalam tahapan perumusan kebijakan hasil KKDN/KKLN tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

- f. Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-1.6 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Sistem Nasional.

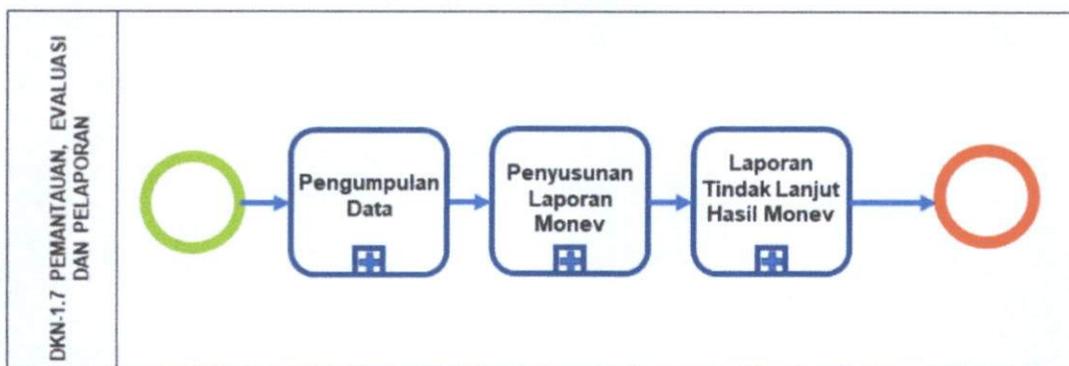
SUB PROSES BISNIS LEVEL 2 DKN-1.6 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERUMUSAN KEBIJAKAN SISTEM NASIONAL



Masing-masing kegiatan dalam tahapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan sistem nasional tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

- g. Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-1.7 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

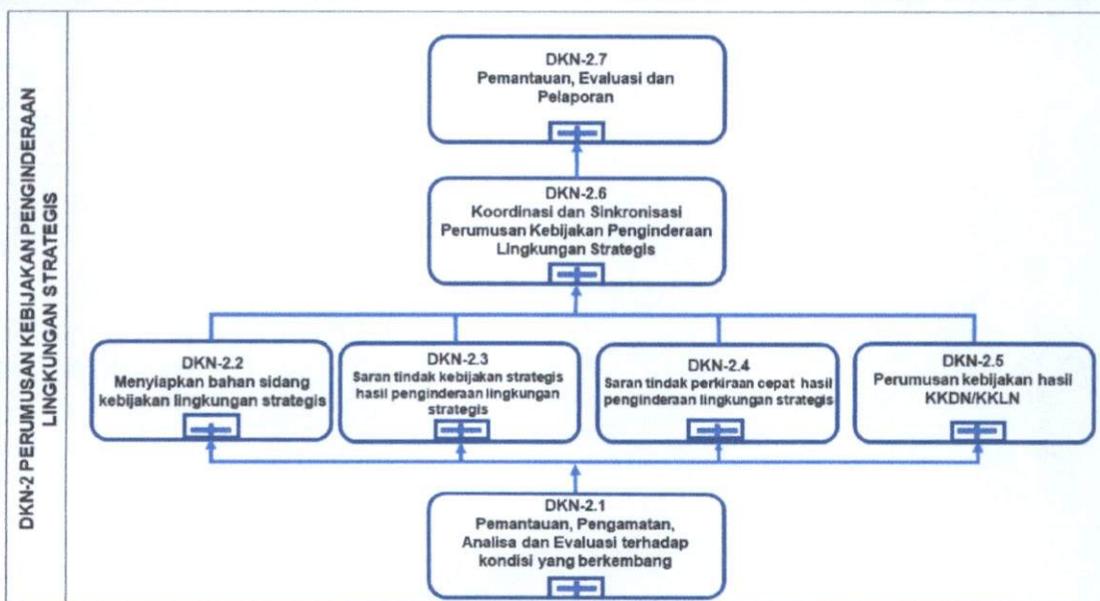
SUB PROSES BISNIS LEVEL 2 DKN-1.7 PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN



Masing-masing kegiatan dalam tahapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

2. Sub Proses Bisnis Level 1 DKN-2 Perumusan Kebijakan Penginderaan Lingkungan Strategis Nasional

SUB PROSES BISNIS LEVEL 1 DKN-2 PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGINDERAAN LINGKUNGAN STRATEGIS



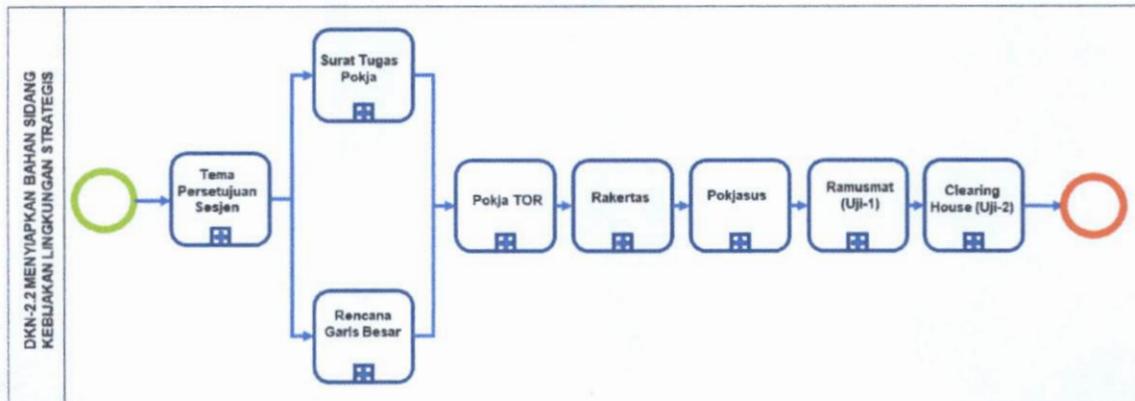
Pemetaan Sub Proses Bisnis Level 1 DKN-2 Perumusan Kebijakan Lingkungan Strategis tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam sub proses bisnis level 2 tersebut dibawah ini:

- a. Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-2.1 Pemantauan, pengamatan, analisa dan evaluasi terhadap kondisi yang berkembang.

Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-2.1 pemantauan, pengamatan, analisa dan evaluasi terhadap kondisi yang berkembang tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

- b. Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-2.2 Menyiapkan bahan sidang kebijakan lingkungan strategis.

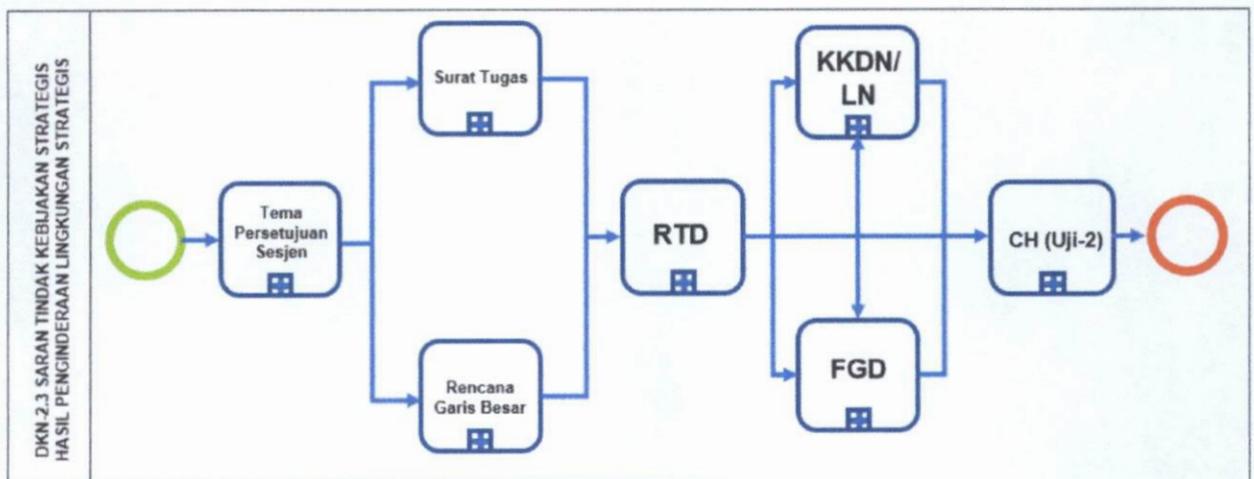
**SUB PROSES BISNIS LEVEL 2 DKN-2.2
MENYIAPKAN BAHAN SIDANG KEBIJAKAN LINGKUNGAN STRATEGIS**



Masing-masing kegiatan dalam tahapan menyiapkan bahan sidang kebijakan lingkungan strategis tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

- c. Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-2.3 Saran tindak kebijakan strategis hasil penginderaan lingkungan strategis.

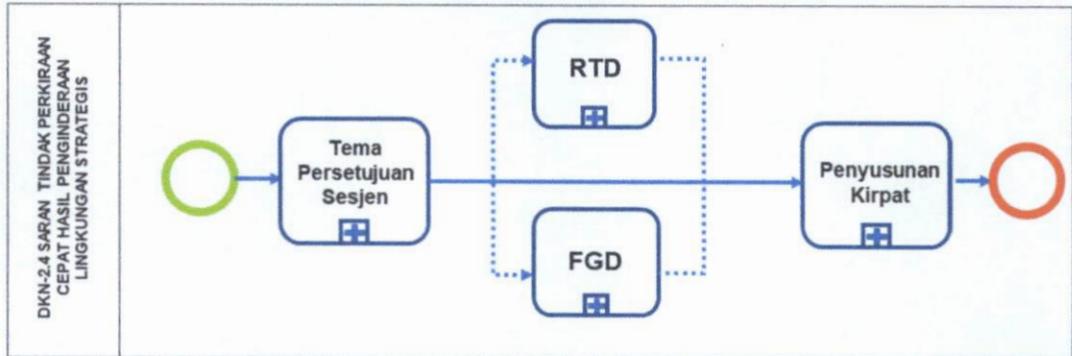
**SUB PROSES BISNIS LEVEL 2 DKN-2.3
SARAN TINDAK KEBIJAKAN STRATEGIS HASIL PENGINDERAAN LINGKUNGAN STRATEGIS**



Masing-masing kegiatan dalam tahapan saran tindak kebijakan strategis hasil penginderaan lingkungan strategis tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

- d. Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-2.4 Saran tindak perkiraan cepat hasil penginderaan lingkungan strategis.

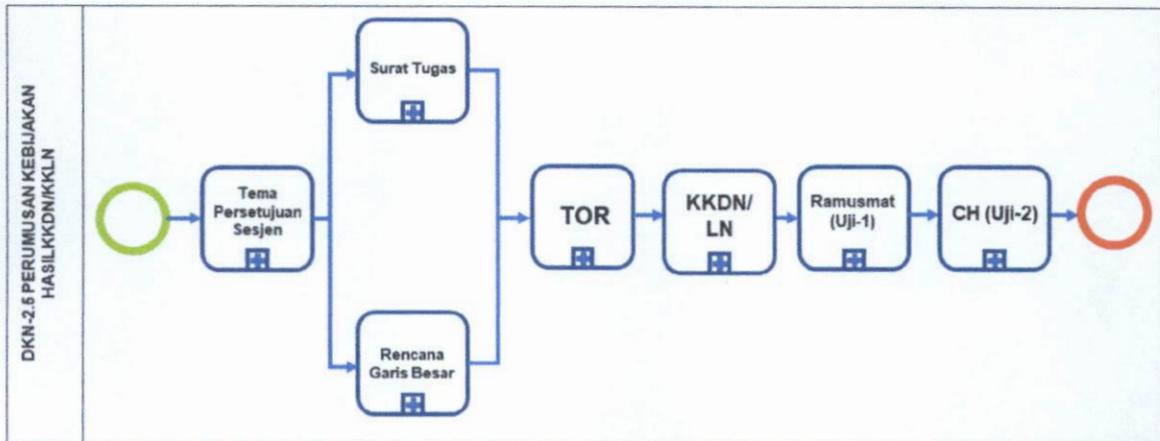
**SUB PROSES BISNIS LEVEL 2 DKN-2.4
SARAN TINDAK PERKIRAAN CEPAT HASIL PENGINDERAAN
LINGKUNGAN STRATEGIS**



Masing-masing kegiatan dalam tahapan saran tindak perkiraan cepat hasil penginderaan lingkungan strategis tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

- e. Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-2.5 Perumusan kebijakan hasil KKDN/KKLN

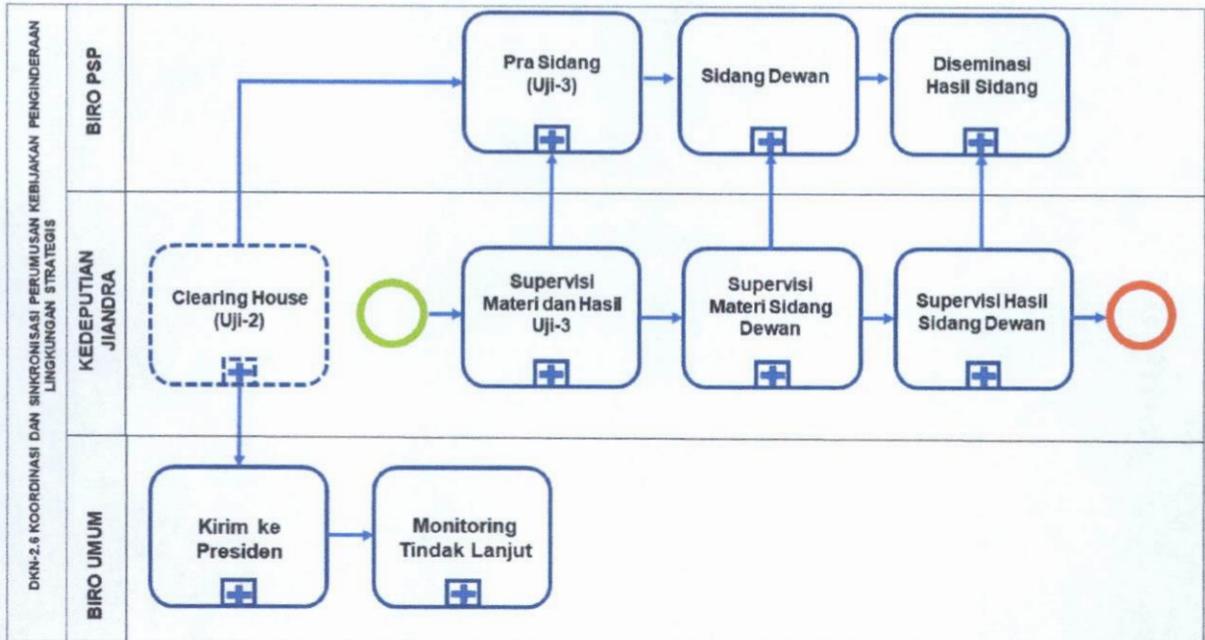
**SUB PROSES BISNIS LEVEL 2 DKN-2.5
PERUMUSAN KEBIJAKAN HASIL KKDN/KKLN**



Masing-masing kegiatan dalam tahapan kebijakan hasil Kerjasama bidang penginderaan lingkungan strategis tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

f. Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-2.6 Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan penginderaan lingkungan strategis.

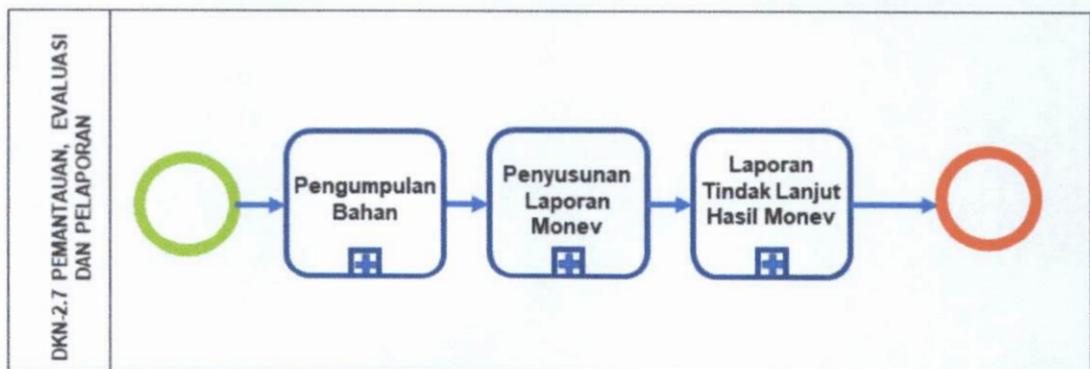
**SUB PROSES BISNIS LEVEL 2 DKN-2.6
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERUMUSAN KEBIJAKAN
PENGINDERAAN LINGKUNGAN STRATEGIS**



Masing-masing kegiatan dalam tahapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan penginderaan lingkungan strategis tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

g. Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-2.7 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

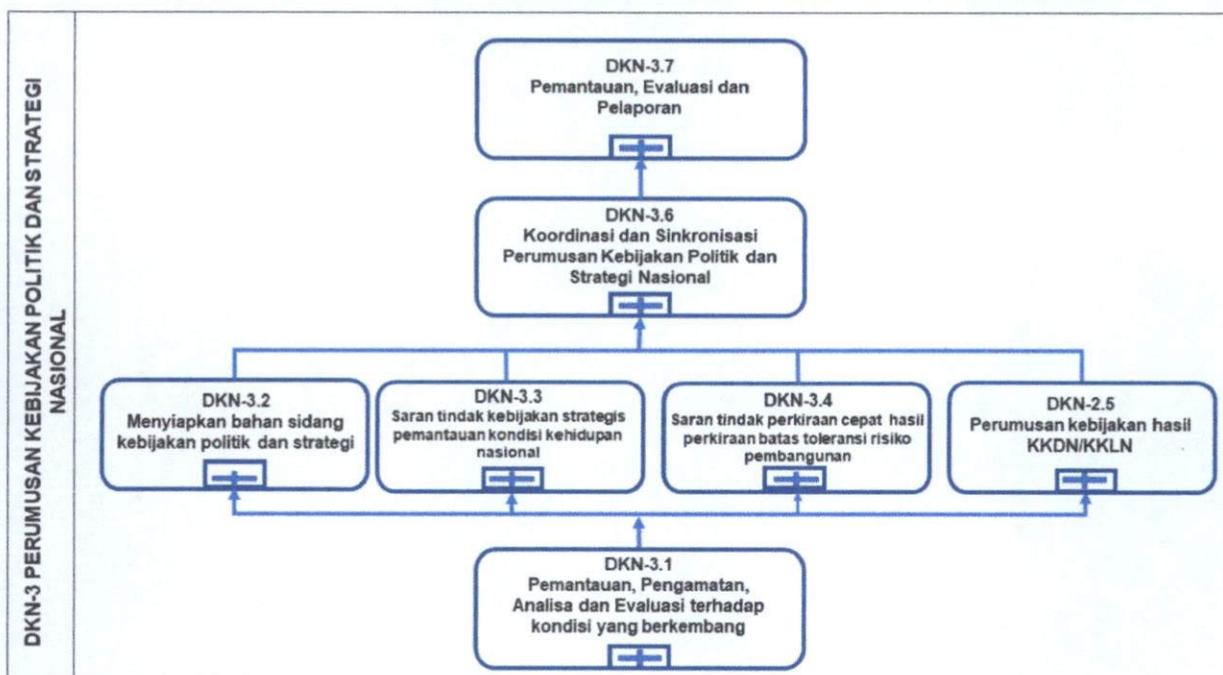
**SUB PROSES BISNIS LEVEL 2 DKN-2.7
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**



Masing-masing kegiatan dalam tahapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

3. Sub Proses Bisnis Level 1 DKN-3 Perumusan Kebijakan Politik dan Strategi Nasional

SUB PROSES BISNIS LEVEL 1 DKN-3 PERUMUSAN KEBIJAKAN POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL



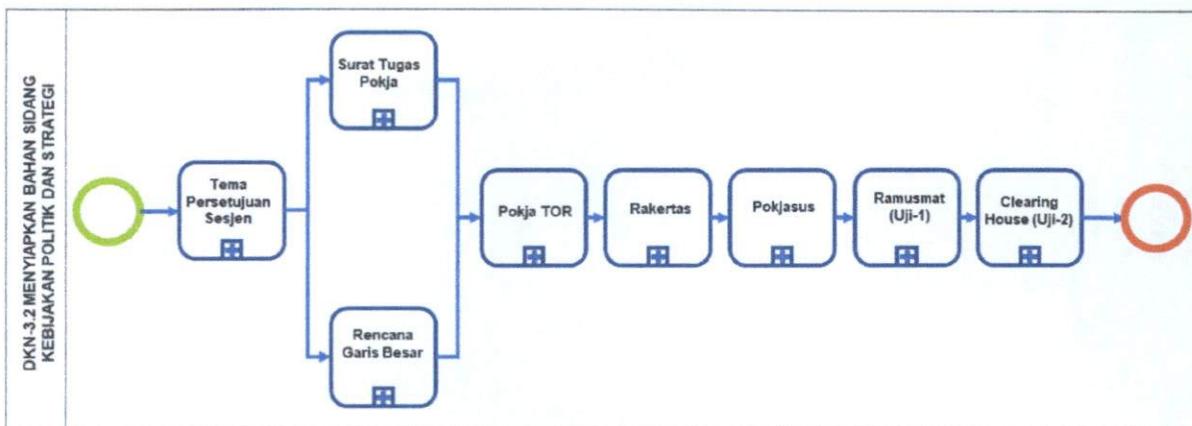
Pemetaan Sub Proses Bisnis Level 1 DKN-3 Perumusan Kebijakan Politik dan Strategi tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam sub proses bisnis level 2 tersebut dibawah ini:

- a. Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-3.1 Pemantauan, pengamatan, analisa dan evaluasi terhadap kondisi yang berkembang.

Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-3.1 pemantauan, pengamatan, analisa dan evaluasi terhadap kondisi yang berkembang tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

- b. Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-3.2 Menyiapkan bahan sidang kebijakan politik dan strategi.

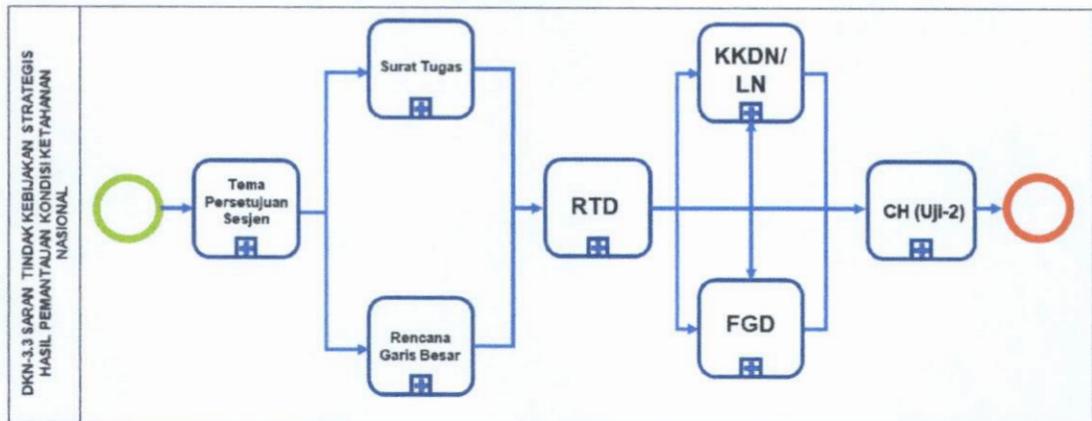
SUB PROSES BISNIS LEVEL 2 DKN-3.2 MENYIAPKAN BAHAN SIDANG KEBIJAKAN POLITIK DAN STRATEGI



Masing-masing kegiatan dalam tahapan menyiapkan bahan sidang kebijakan politik dan strategi tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

- c. Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-3.3 Saran tindak kebijakan strategis hasil pemantauan kondisi ketahanan nasional.

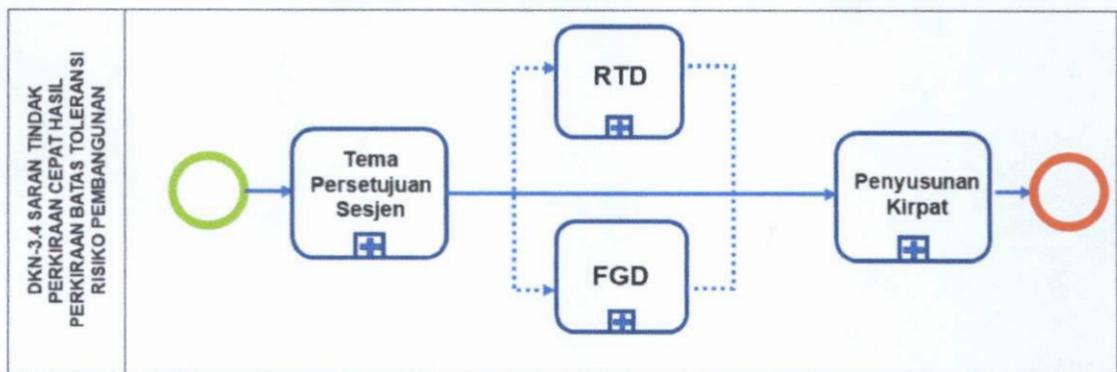
SUB PROSES BISNIS LEVEL 2 DKN-3.3
SARAN TINDAK KEBIJAKAN STRATEGIS HASIL PEMANTAUAN
KONDISI KETAHANAN NASIONAL



Masing-masing kegiatan dalam tahapan saran tindak kebijakan strategis hasil pemantauan kondisi ketahanan nasional tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

- d. Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-3.4 Saran tindak perkiraan cepat hasil perkiraan batas toleransi risiko pembangunan.

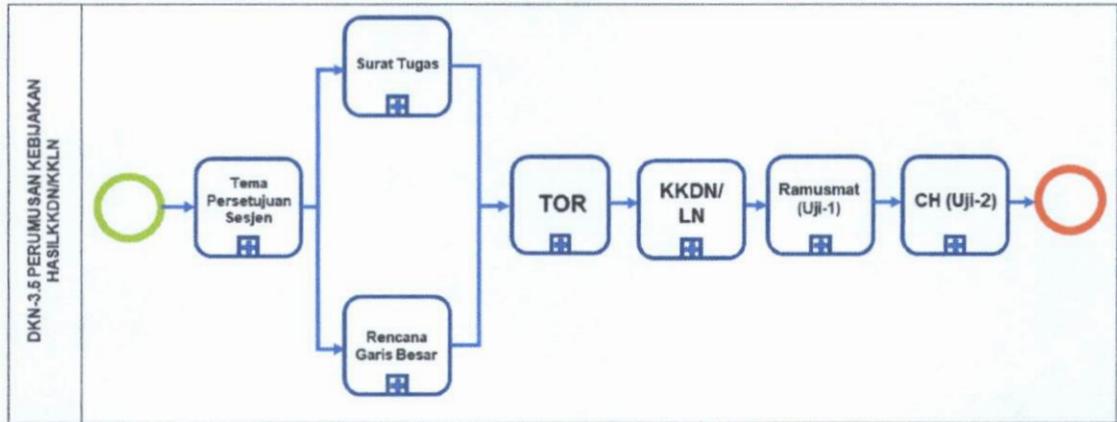
SUB PROSES BISNIS LEVEL 2 DKN-3.4
SARAN TINDAK PERKIRAAN CEPAT HASIL PERKIRAAN BATAS
TOLERANSI RISIKO PEMBANGUNAN



Masing-masing kegiatan dalam tahapan saran tindak perkiraan cepat hasil perkiraan batas toleransi risiko pembangunan tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

- e. Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-3.5 Perumusan kebijakan hasil KKDN/KKLN

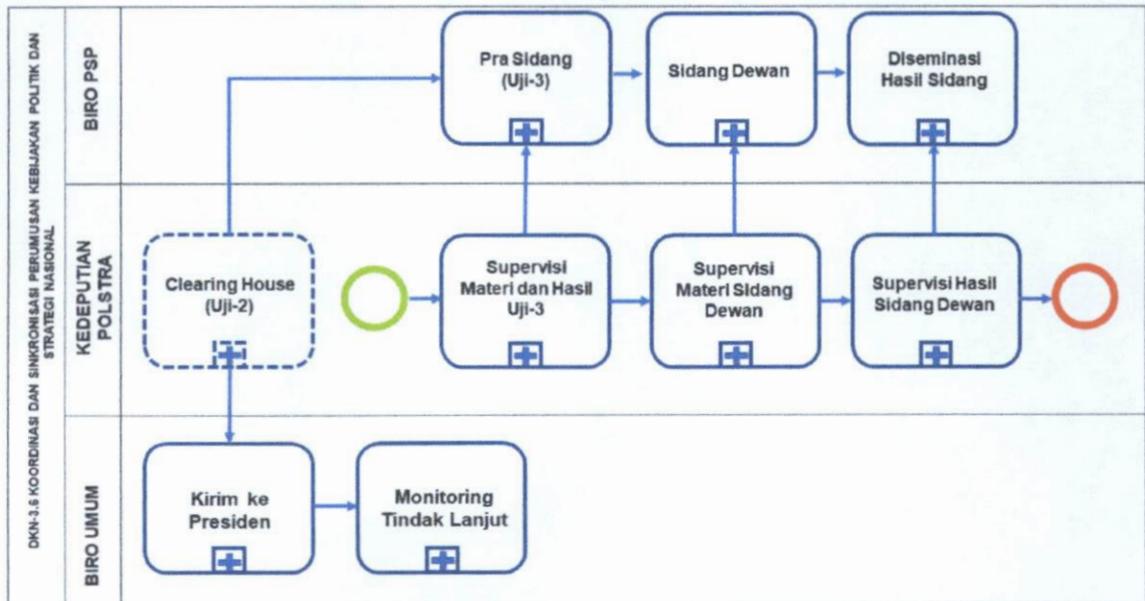
**SUB PROSES BISNIS LEVEL 2 DKN-3.5
PERUMUSAN KEBIJAKAN HASIL KKDN/KKLN**



Masing-masing kegiatan dalam tahapan perumusan kebijakan hasil kerjasama bidang politik dan strategi nasional tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

- f. Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-3.6 Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan politik dan strategi nasional.

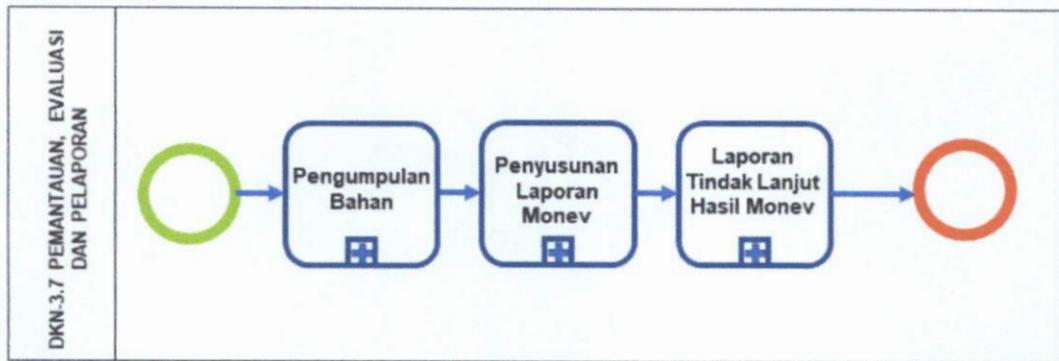
**SUB PROSES BISNIS LEVEL 2 DKN-3.6
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERUMUSAN KEBIJAKAN
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL**



Masing-masing kegiatan dalam tahapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan politik dan strategi nasional tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

- g. Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-3.7 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

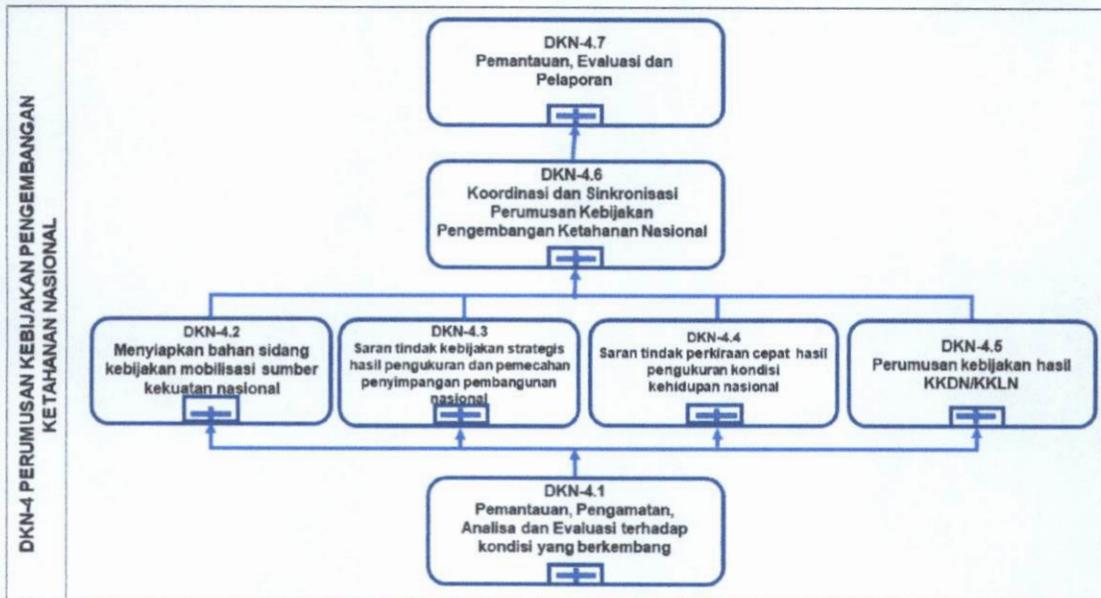
**SUB PROSES BISNIS LEVEL 2 DKN-3.7
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**



Masing-masing kegiatan dalam tahapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

4. Sub Proses Bisnis Level 1 DKN-4 Perumusan Kebijakan Pengembangan Ketahanan Nasional

**SUB PROSES BISNIS LEVEL 1 DKN-4
PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KETAHANAN NASIONAL**



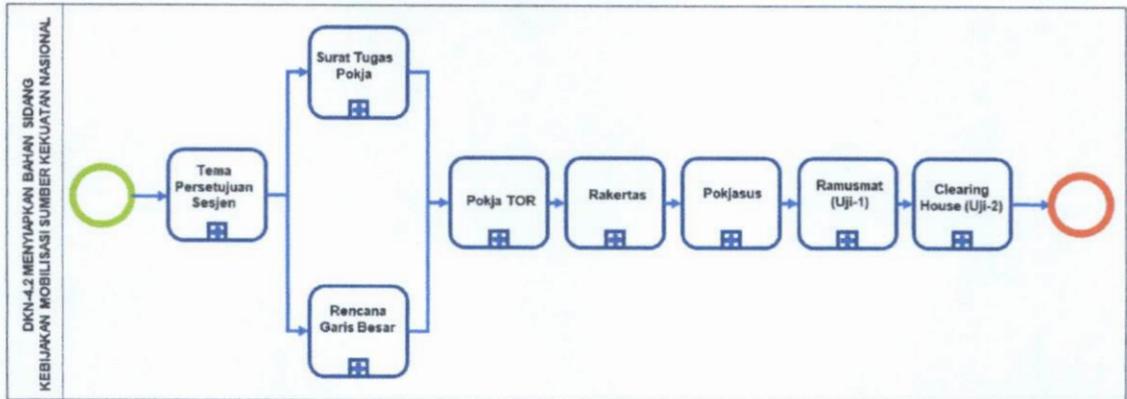
Pemetaan Sub Proses Bisnis Level 1 DKN-4 Perumusan Kebijakan Pengembangan Ketahanan Nasional tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam sub proses bisnis level 2 tersebut dibawah ini:

- a. Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-4.1 Pemantauan, pengamatan, analisa dan evaluasi terhadap kondisi yang berkembang.

Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-4.1 pemantauan, pengamatan, analisa dan evaluasi terhadap kondisi yang berkembang tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

- b. Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-4.2 Menyiapkan bahan sidang kebijakan mobilisasi sumber kekuatan nasional.

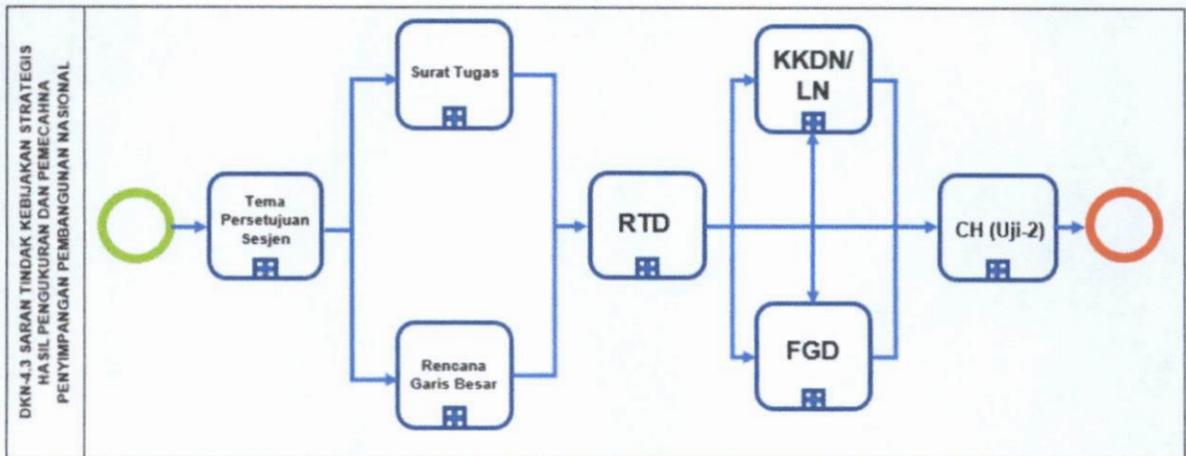
**SUB PROSES BISNIS LEVEL 2 DKN-4.2
MENYIAPKAN BAHAN SIDANG KEBIJAKAN MOBILISASI SUMBER
KEKUATAN NASIONAL**



Masing-masing kegiatan dalam tahapan menyiapkan bahan sidang kebijakan mobilisasi sumber kekuatan nasional tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

- c. Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-4.3 Saran tindak kebijakan strategis hasil pengukuran dan pemecahan penyimpangan pembangunan nasional.

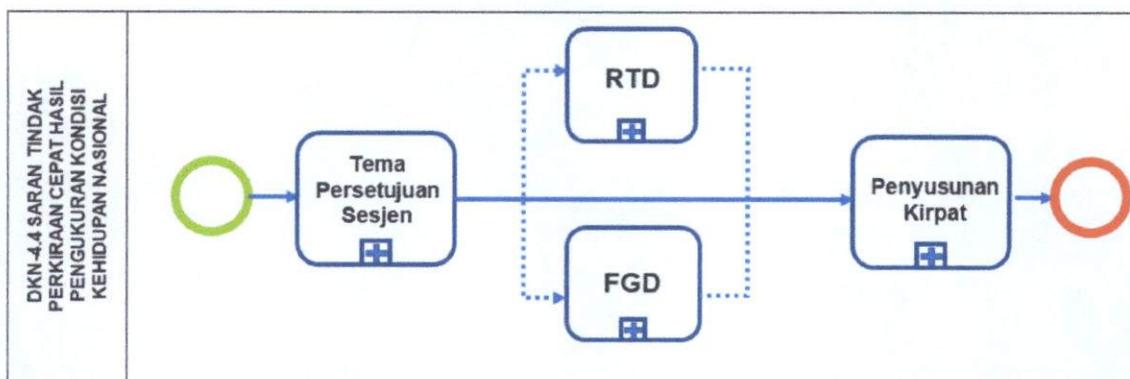
**SUB PROSES BISNIS LEVEL 2 DKN-4.3
SARAN TINDAK KEBIJAKAN STRATEGIS HASIL PENGUKURAN DAN
PEMECAHAN PENYIMPANGAN PEMBANGUNAN NASIONAL**



Masing-masing kegiatan dalam tahapan saran tindak kebijakan strategis hasil pengukuran dan pemecahan penyimpangan pembangunan nasional tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

- d. Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-4.4 Saran tindak perkiraan cepat hasil pengukuran kondisi kehidupan nasional.

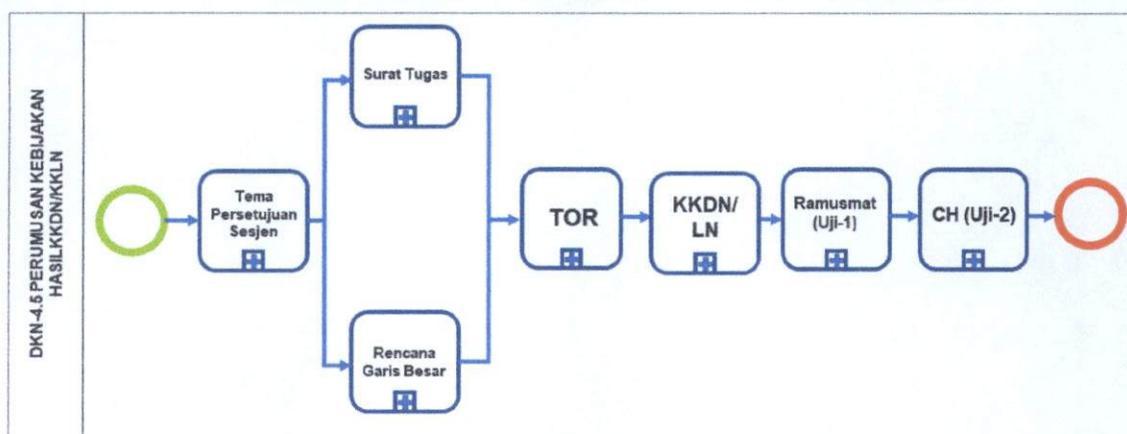
**SUB PROSES BISNIS LEVEL 2 DKN-4.4
SARAN TINDAK PERKIRAAN CEPAT HASIL PENGUKURAN KONDISI
KEHIDUPAN NASIONAL**



Masing-masing kegiatan dalam tahapan saran tindak perkiraan cepat hasil pengukuran kondisi kehidupan nasional tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

- e. Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-4.5 Perumusan kebijakan hasil KKDN/KKLN

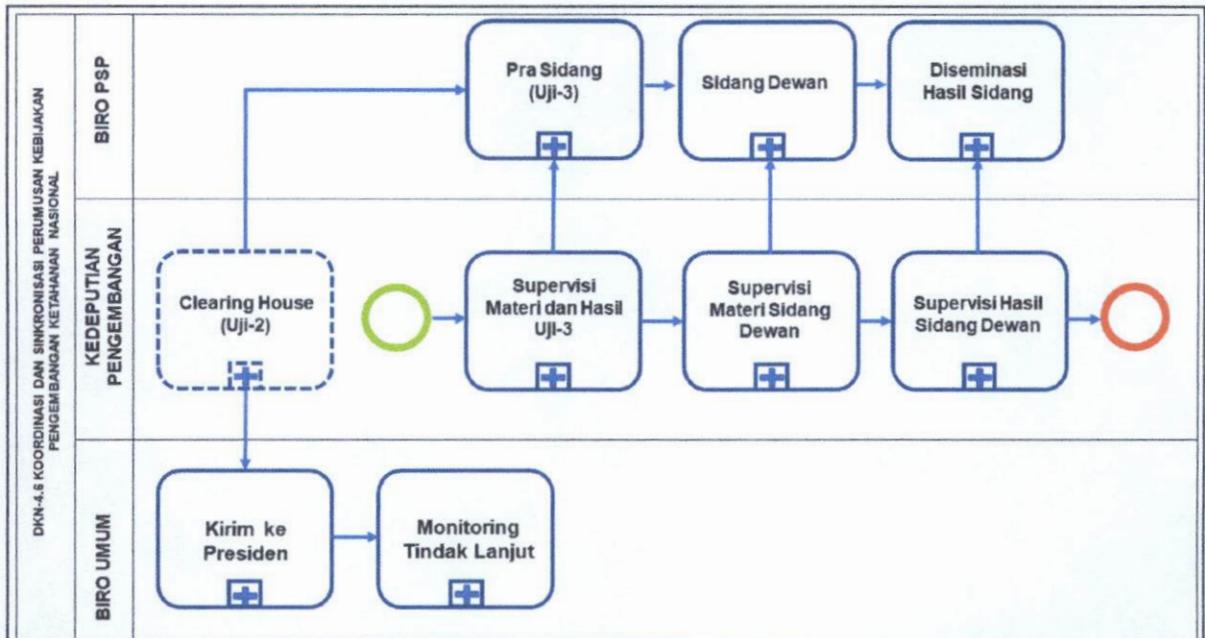
**SUB PROSES BISNIS LEVEL 2 DKN-4.5
PERUMUSAN KEBIJAKAN HASIL KKDN/KKLN**



Masing-masing kegiatan dalam tahapan perumusan kebijakan hasil KKDN/KKLN tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

f.Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-4.6 Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pengembangan ketahanan nasional.

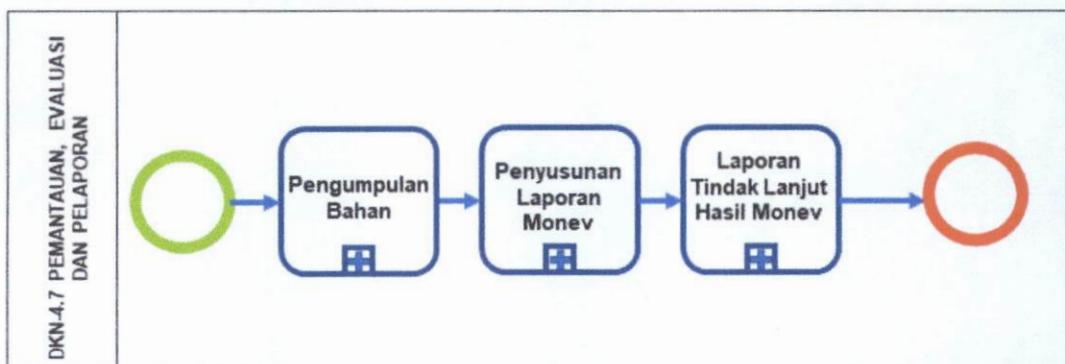
**SUB PROSES BISNIS LEVEL 2 DKN-4.6
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERUMUSAN KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN KETAHANAN NASIONAL**



Masing-masing kegiatan dalam tahapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pengembangan ketahanan nasional tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

g. Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-4.7 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

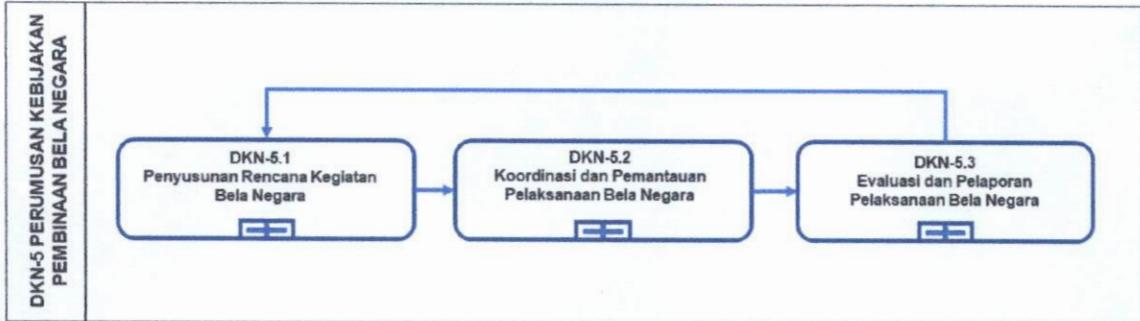
**SUB PROSES BISNIS LEVEL 2 DKN-4.7
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**



Masing-masing kegiatan dalam tahapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

5. Sub Proses Bisnis Level 1 DKN-5 Perumusan Kebijakan Pembinaan Bela Negara

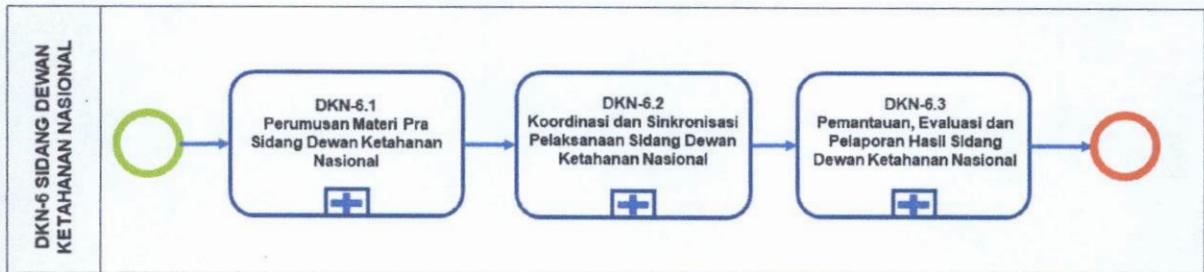
**SUB PROSES BISNIS LEVEL 1 DKN-5
PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMBINAAN BELA NEGARA**



Masing-masing kegiatan dalam tahapan perumusan kebijakan pembinaan bela negara tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

6. Proses Bisnis Level 1 DKN-6 Sidang Dewan Ketahanan Nasional

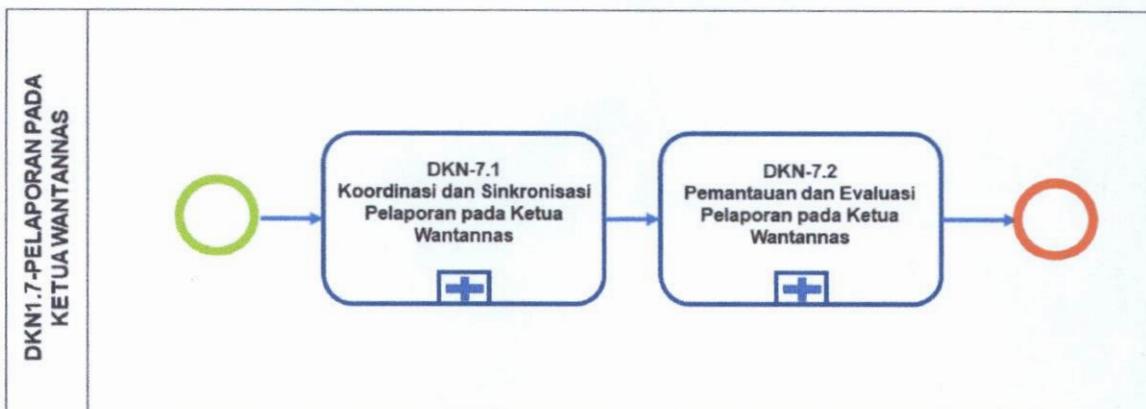
**PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 DKN-6
SIDANG DEWAN KETAHANAN NASIONAL**



Masing-masing kegiatan dalam tahapan sidang dewan ketahanan nasional tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

7. Proses Bisnis Level 1 DKN-7 Pelaporan Saran Tindak

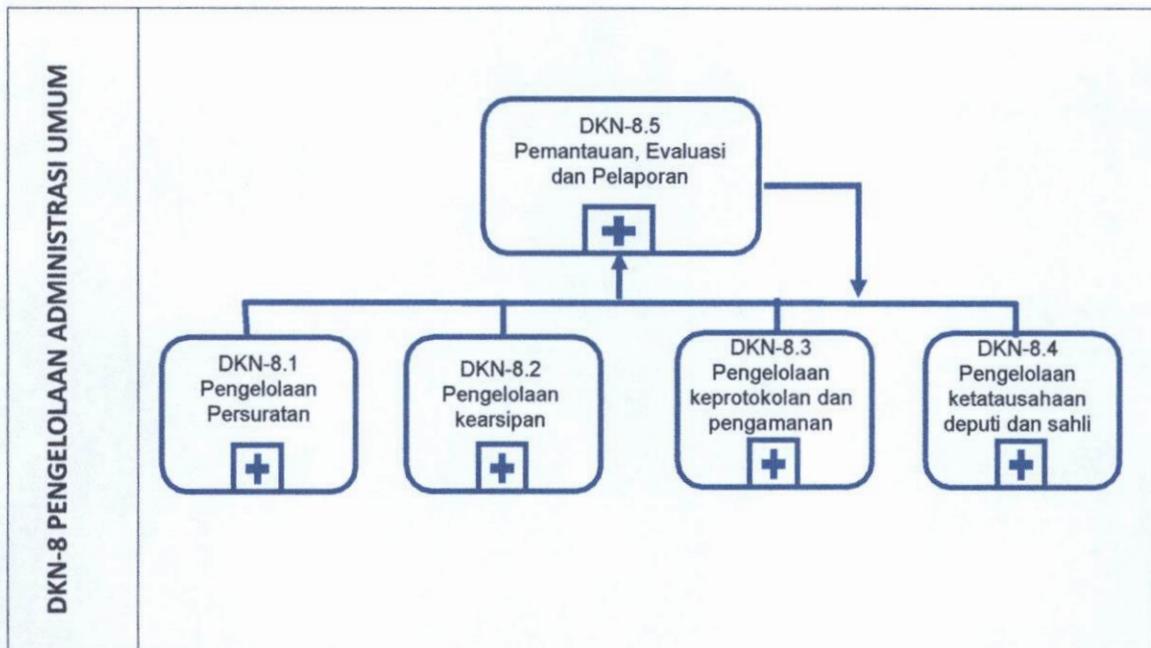
**PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 DKN-7
PELAPORAN PADA KETUA WANTANNAS**



Masing-masing kegiatan dalam tahapan kegiatan pelaporan pada Ketua Wantannas tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

8. Sub Proses Bisnis Level 1 DKN-8 Pengelolaan Administrasi Umum

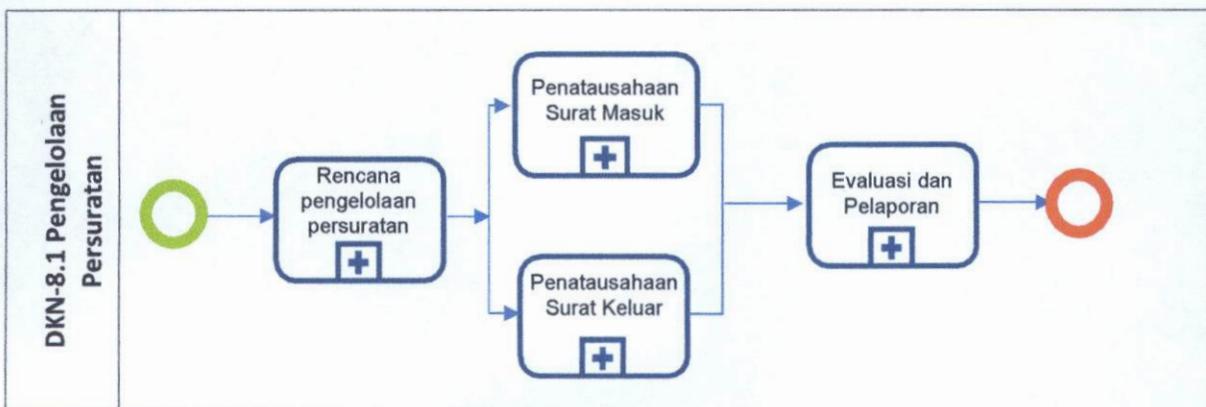
**SUB PROSES BISNIS LEVEL 1 DKN-8
PENGELOLAAN ADMINISTRASI UMUM**



Pemetaan Sub Proses Bisnis Level 1 DKN-8 Pengelolaan Administrasi Umum tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam sub proses bisnis level 2 tersebut di bawah ini:

a. Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-8.1 Pengelolaan Persuratan

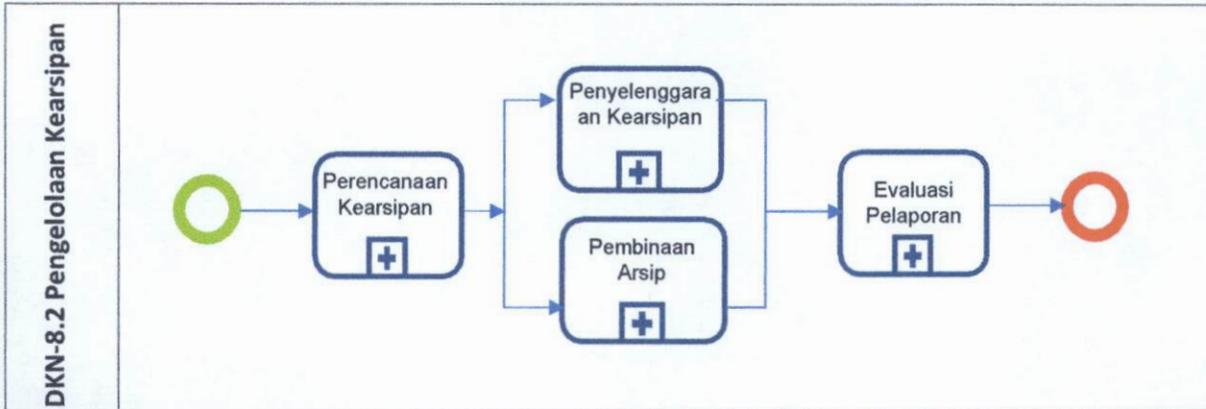
**SUB PROSES BISNIS LEVEL 2 DKN-8.1
PENGELOLAAN PERSURATAN**



Masing-masing kegiatan dalam tahapan pengelolaan persuratan tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

b. Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-8.2 Pengelolaan Kearsipan

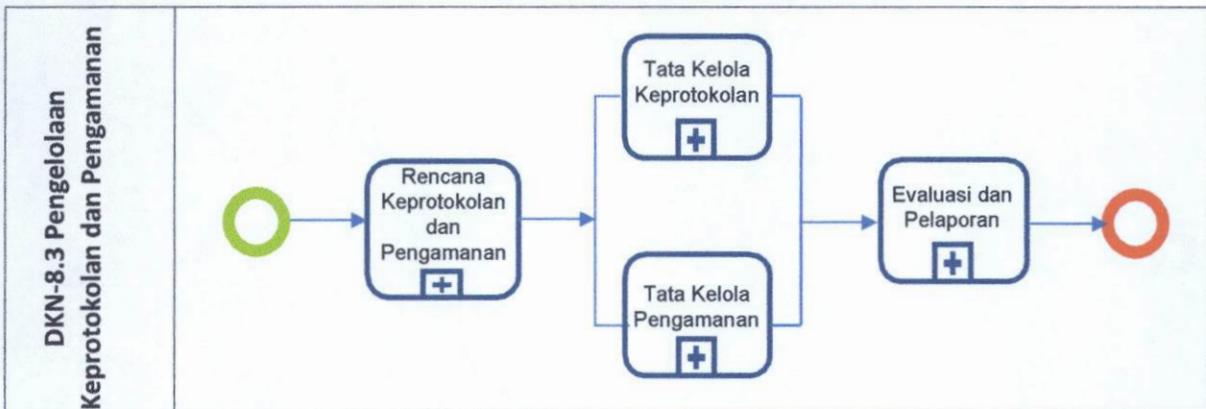
**SUB PROSES BISNIS LEVEL 2 DKN-8.2
PENGELOLAAN KEARSIPAN**



Masing-masing kegiatan dalam tahapan pengelolaan kearsipan tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

c. Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-8.3 Pengelolaan Keprotokolan dan Pengamanan.

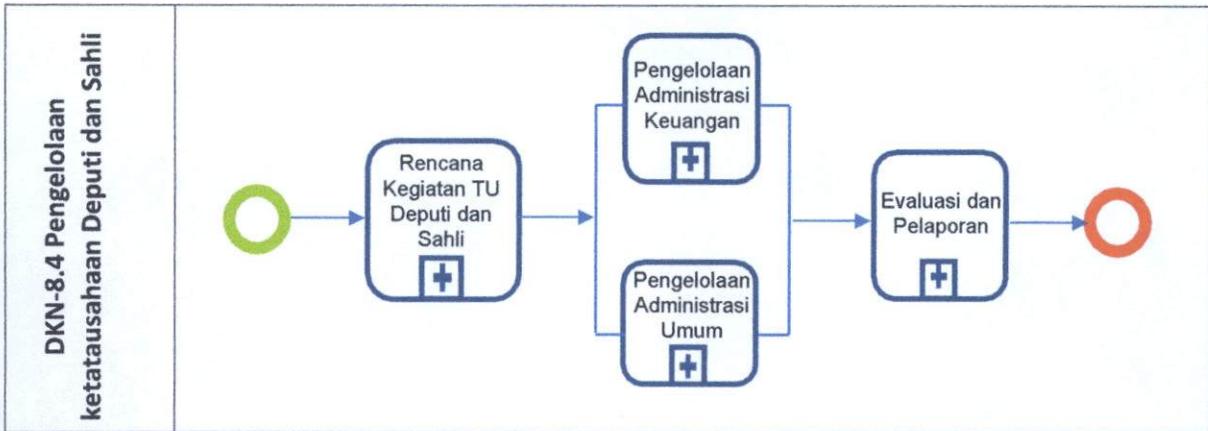
**SUB PROSES BISNIS LEVEL 2 DKN-8.3
PENGELOLAAN KEPROTOKOLAN DAN PENGAMANAN**



Masing-masing kegiatan dalam tahapan pengelolaan keprotokolan dan pengamanan tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

- d. Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-8.4 Pengelolaan ketatausahaan Deputy dan Sahli

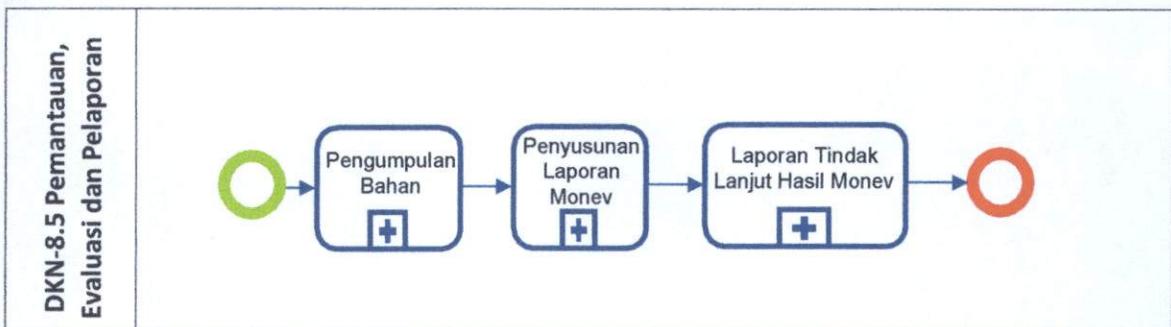
**SUB PROSES BISNIS LEVEL 2 DKN-8.4
PENGELOLAAN KETATAUSAHAAN DEPUTI DAN SAHLI**



Masing-masing kegiatan dalam tahapan pengelolaan ketatausahaan pimpinan tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

- e. Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-8.5 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

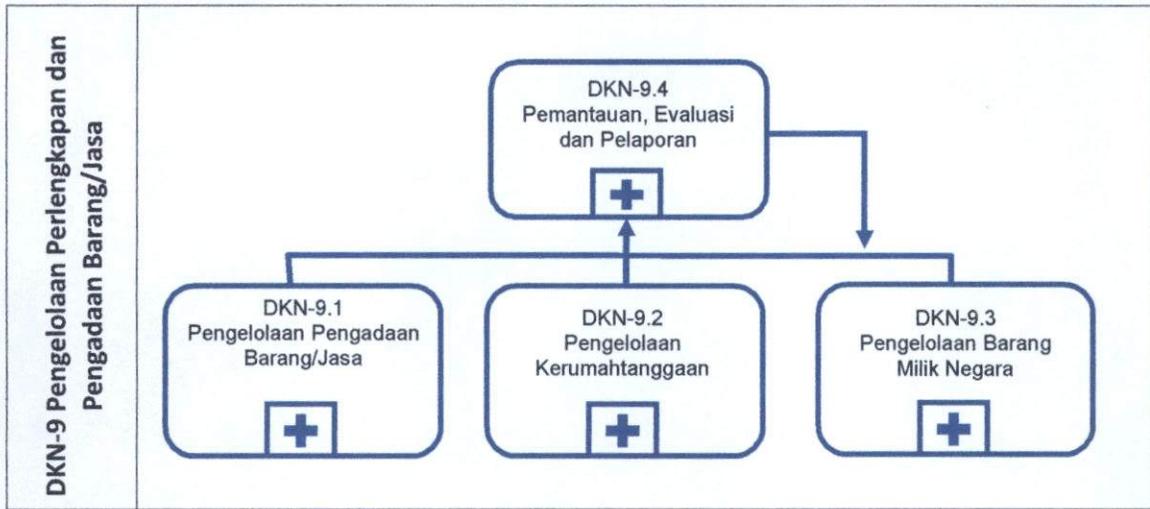
**SUB PROSES BISNIS LEVEL 2 DKN-8.5
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**



Masing-masing kegiatan dalam tahapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

9. Sub Proses Bisnis Level 1 DKN-9 Pengelolaan Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa

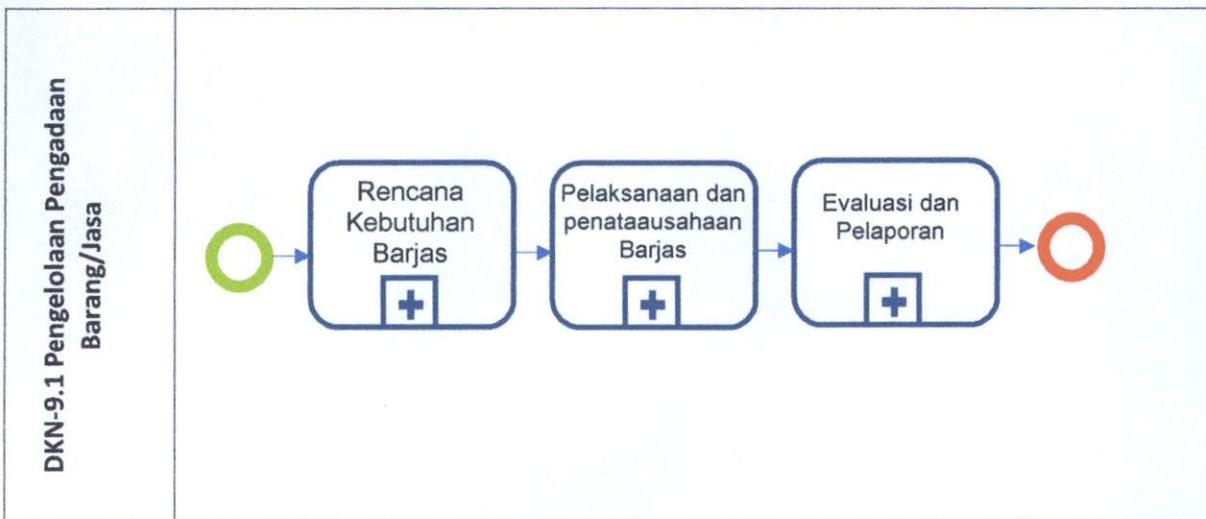
**SUB PROSES BISNIS LEVEL 1 DKN-9
PENGELOLAAN PERLENGKAPAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA**



Pemetaan Sub Proses Bisnis Level 1 DKN-9 Pengelolaan Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam sub proses bisnis level 2 tersebut dibawah ini:

- a. Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-9.1 Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa.

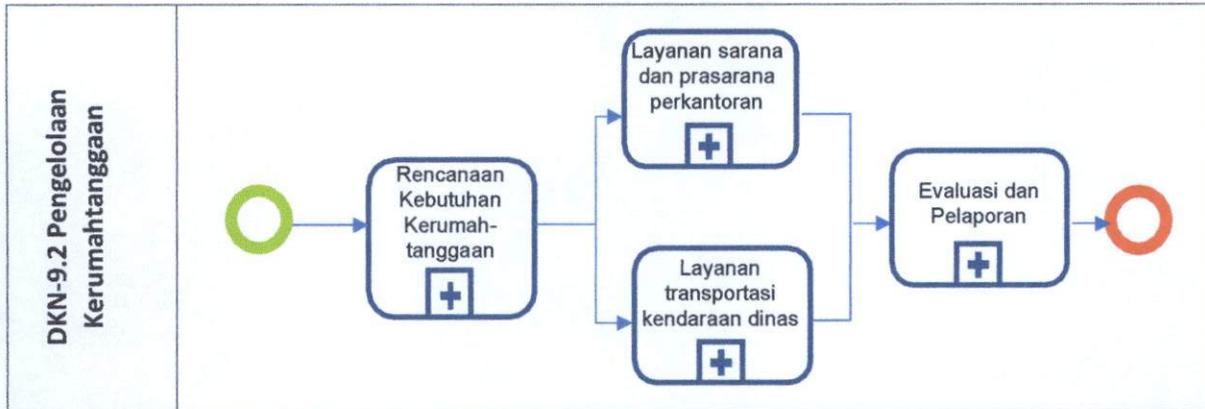
**SUB PROSES BISNIS LEVEL 2 DKN-9.1
PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA**



Masing-masing kegiatan dalam tahapan Pengelolaan pengadaan barang/jasa tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

b. Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-9.2 Pengelolaan Kerumahtanggaan.

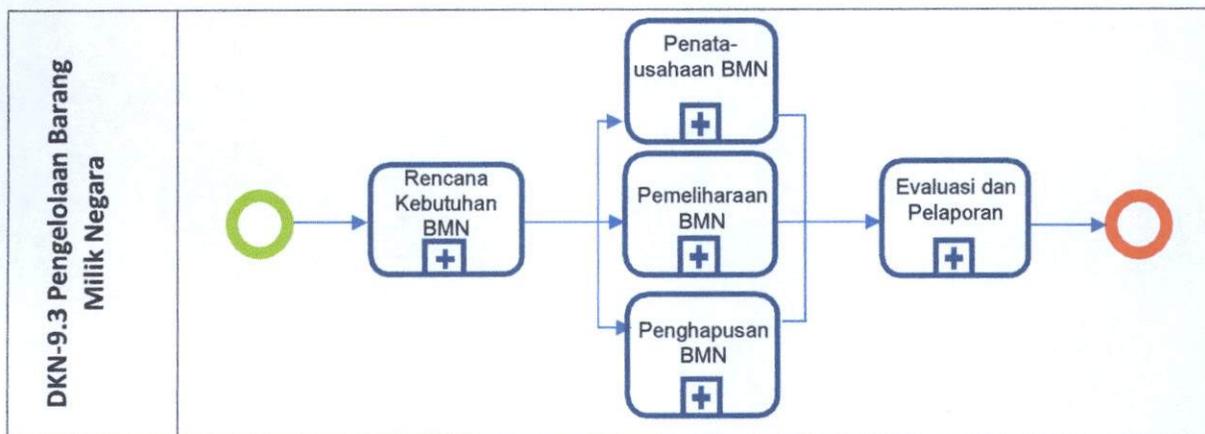
**SUB PROSES BISNIS LEVEL 2 DKN-9.2
PENGELOLAAN KERUMAHTANGGAAN**



Masing-masing kegiatan dalam tahapan pengelolaan kerumahtanggaan tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

c. Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-9.3 Pengelolaan Barang Milik Negara.

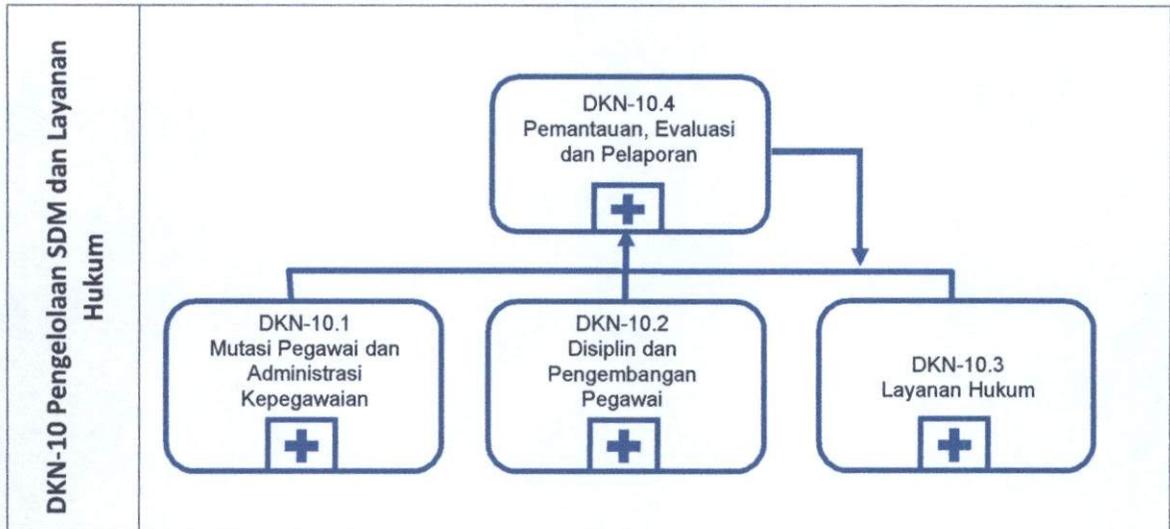
**SUB PROSES BISNIS LEVEL 2 DKN-9.3
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA**



Masing-masing kegiatan dalam tahapan pengelolaan Barang Milik Negara tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

10.Sub Proses Bisnis Level 1 DKN-10 Pengelolaan SDM dan Layanan Hukum

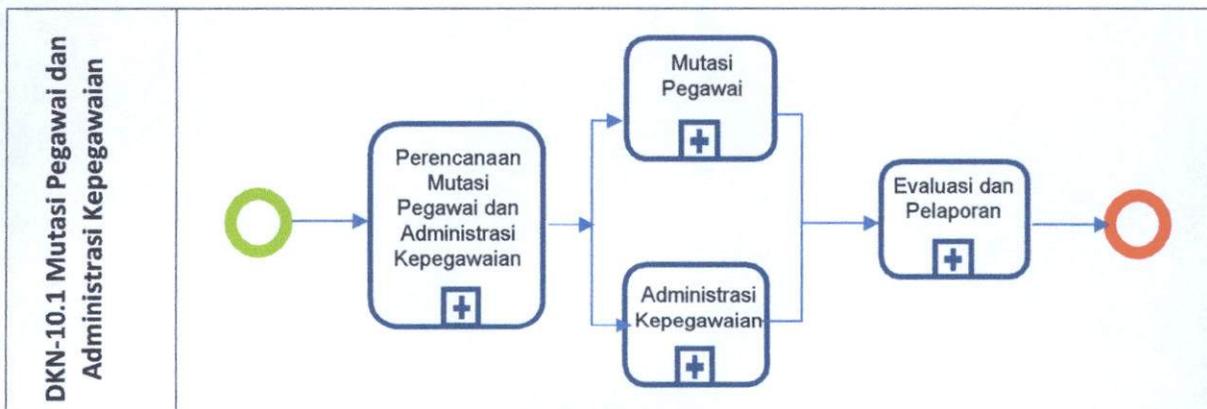
**SUB PROSES BISNIS LEVEL 1 DKN-10
PENGELOLAAN SDM DAN LAYANAN HUKUM**



Pemetaan Sub Proses Bisnis Level 1 DKN-10 Pengelolaan SDM dan Layanan Hukum tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam sub proses bisnis level 2 tersebut dibawah ini:

- a. Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-10.1 Mutasi Pegawai dan Administrasi Kepegawaian.

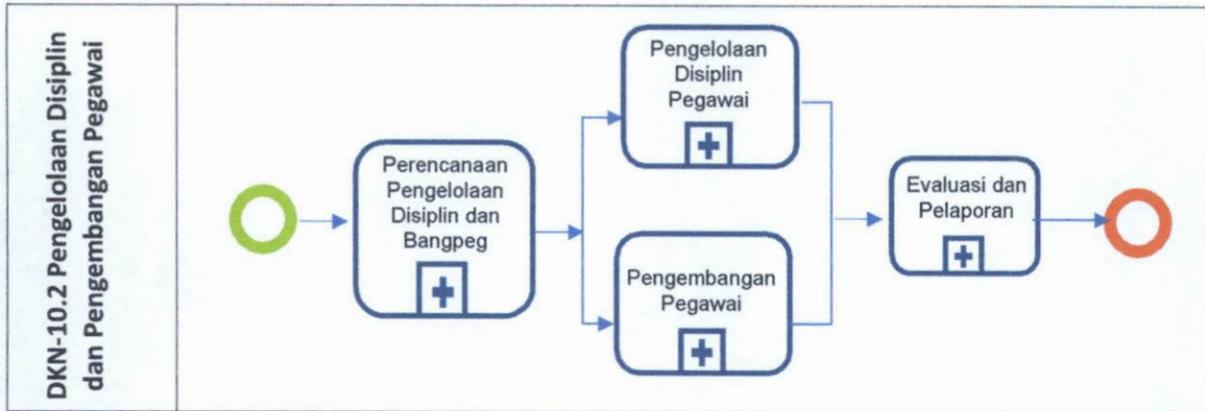
**SUB PROSES BISNIS LEVEL 2 DKN-10.1
MUTASI PEGAWAI DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN**



Masing-masing kegiatan dalam tahapan mutasi pegawai dan administrasi kepegawaian tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

- b. Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-10.2 Disiplin dan Pengembangan Pegawai.

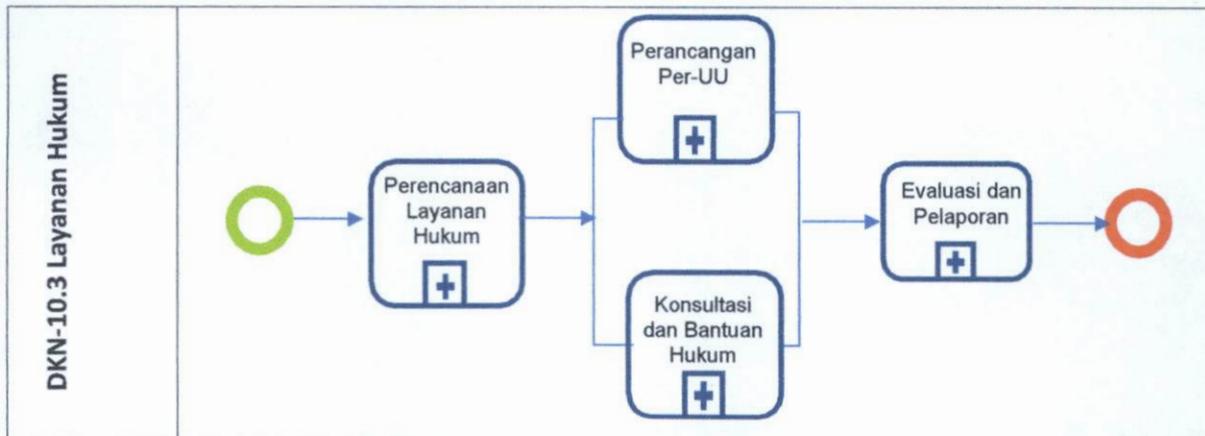
**SUB PROSES BISNIS LEVEL 2 DKN-10.2
DISIPLIN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI**



Masing-masing kegiatan dalam tahapan pengelolaan disiplin dan pengembangan pegawai tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

- c. Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-10.3 Layanan Hukum.

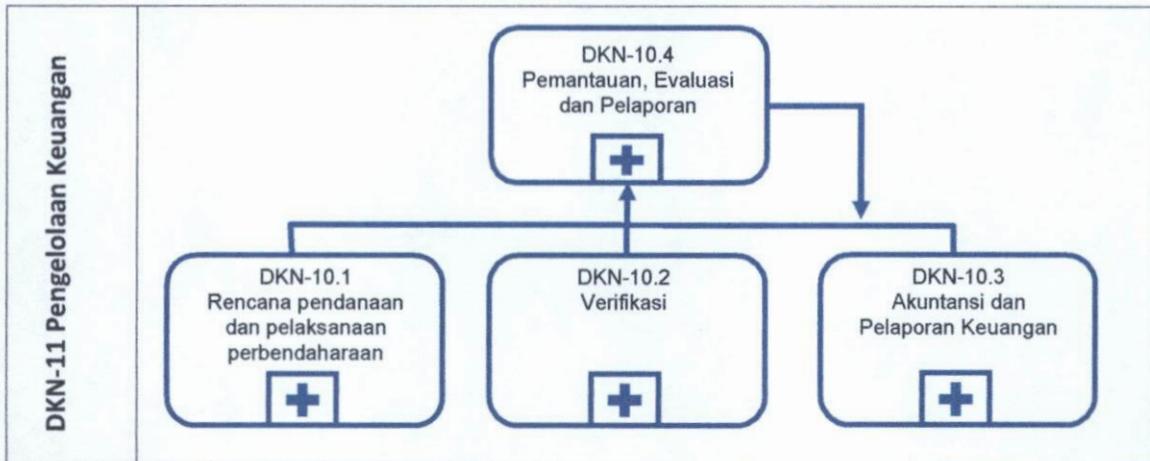
**SUB PROSES BISNIS LEVEL 2 DKN-10.3
LAYANAN HUKUM**



Masing-masing kegiatan dalam tahapan pengelolaan layanan hukum tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

11. Sub Proses Bisnis Level 1 DKN-11 Pengelolaan Keuangan

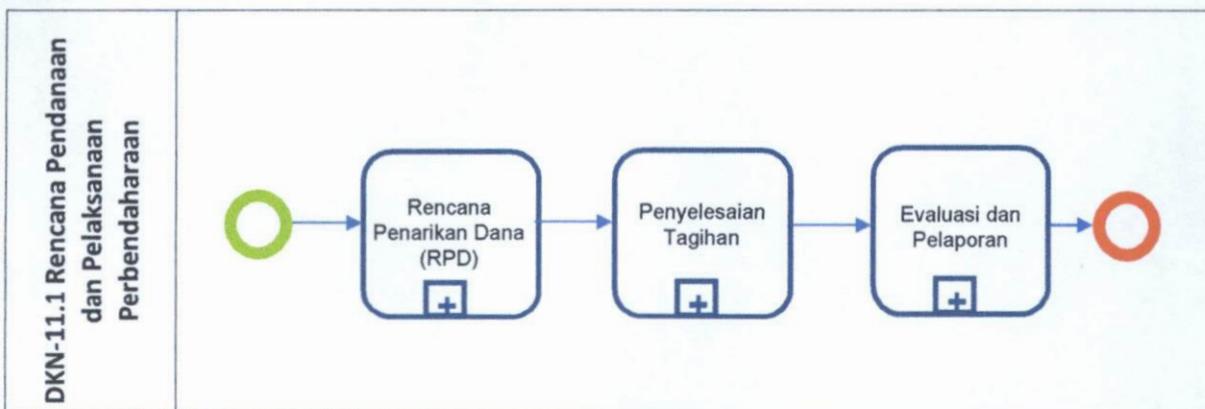
SUB PROSES BISNIS LEVEL 1 DKN-11 PENGELOLAAN KEUANGAN



Pemetaan Sub Proses Bisnis Level 1 DKN-11 Pengelolaan Keuangan tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam sub proses bisnis level 2 tersebut dibawah ini:

- a. Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-11.1 Rencana pendanaan dan pelaksanaan perbendaharaan.

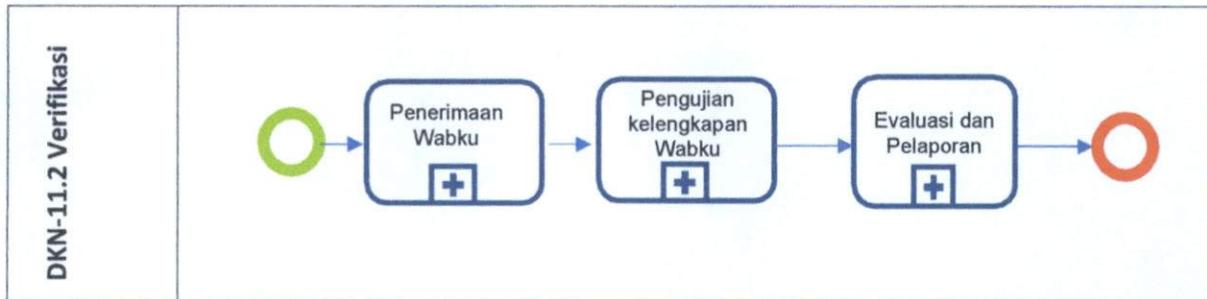
SUB PROSES BISNIS LEVEL 2 DKN-11.1 RENCANA PENDANAAN DAN PELAKSANAAN PERBENDAHARAAN



Masing-masing kegiatan dalam tahapan rencana pendanaan dan pelaksanaan perbendaharaan tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

b. Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-11.2 Verifikasi.

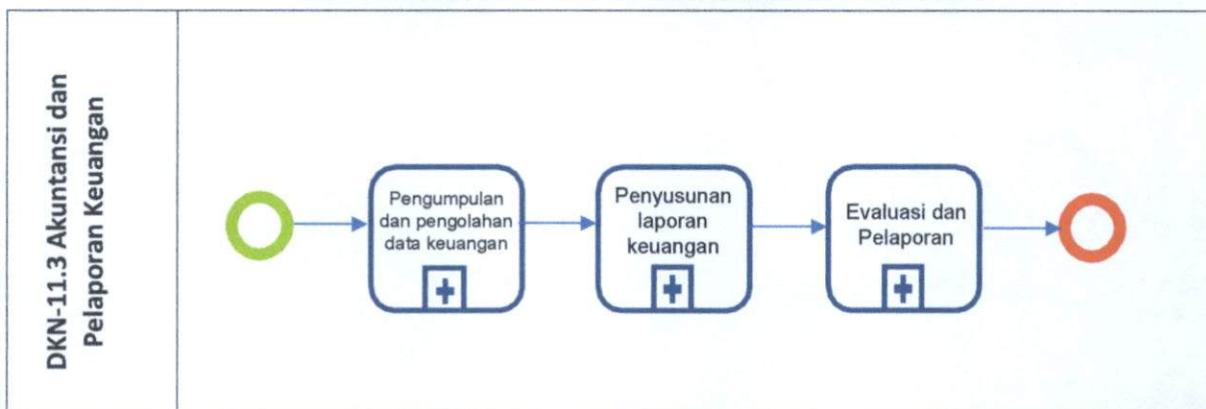
**SUB PROSES BISNIS LEVEL 2 DKN-11.2
VERIFIKASI**



Masing-masing kegiatan dalam tahapan verifikasi tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

c. Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-11.3 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

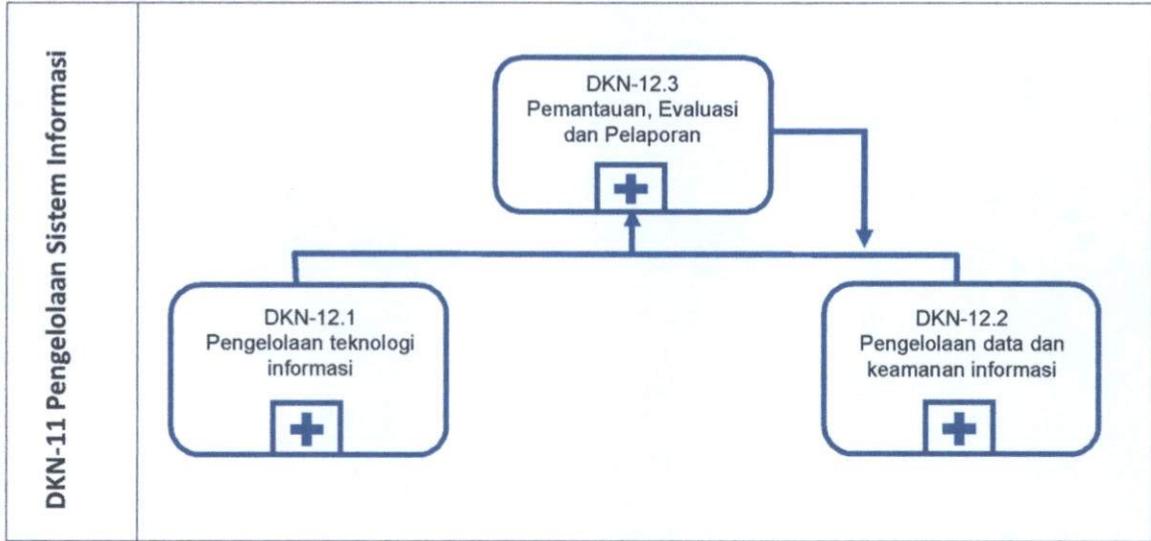
**SUB PROSES BISNIS LEVEL 2 DKN-11.3
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**



Masing-masing kegiatan dalam tahapan akuntansi dan pelaporan keuangan tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

12. Sub Proses Bisnis Level 1 DKN-12 Pengelolaan Sistem Informasi

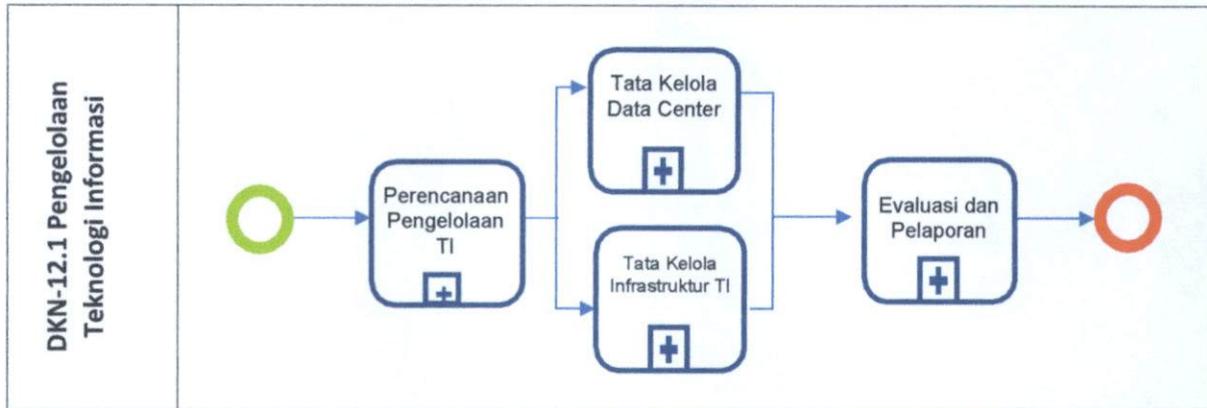
SUB PROSES BISNIS LEVEL 1 DKN-12 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI



Pemetaan Sub Proses Bisnis Level 1 DKN-12 Pengelolaan Sistem Informasi tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam sub proses bisnis level 2 tersebut dibawah ini:

- a. Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-12.1 Pengelolaan Teknologi Informasi.

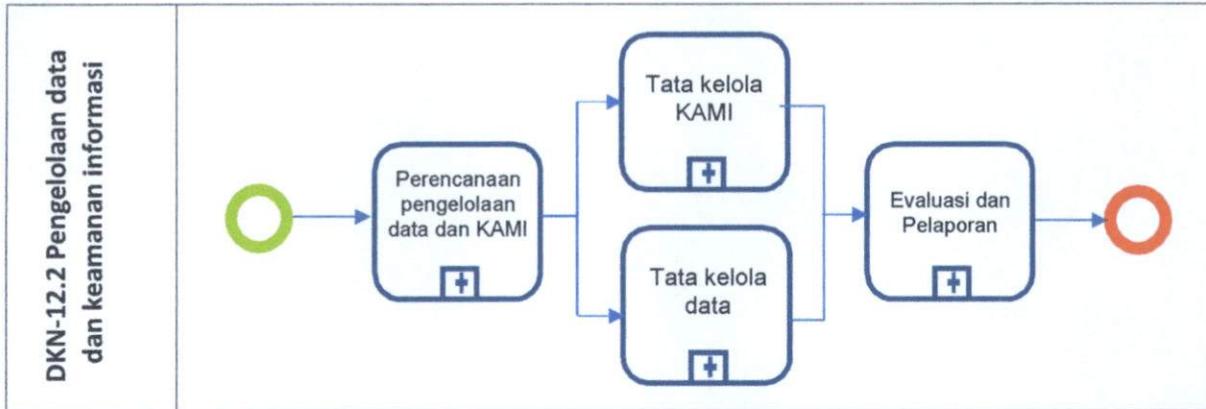
SUB PROSES BISNIS LEVEL 2 DKN-12.1 PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI



Masing-masing kegiatan dalam tahapan pengelolaan teknologi informasi tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

- b. Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-12.2 Pengelolaan data dan keamanan informasi.

**SUB PROSES BISNIS LEVEL 2 DKN-12.2
PENGELOLAAN DATA DAN KEAMANAN INFORMASI**



Masing-masing kegiatan dalam tahapan pengelolaan data dan keamanan informasi tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

- c. Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-12.3 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

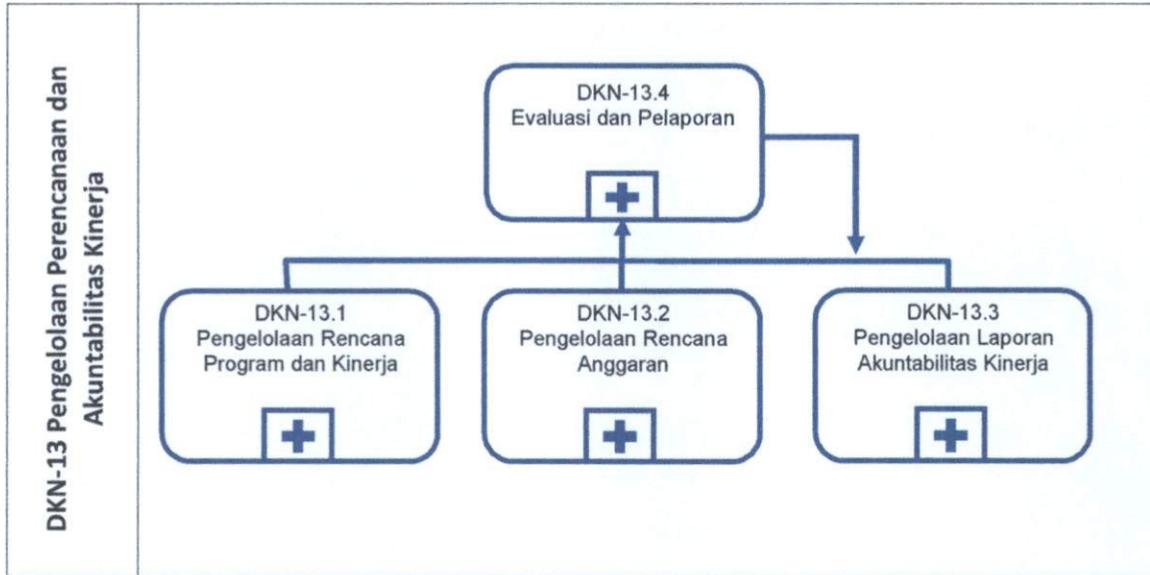
**SUB PROSES BISNIS LEVEL 2 DKN-12.3
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**



Masing-masing kegiatan dalam tahapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

13.Sub Proses Bisnis Level 1 DKN-13 Pengelolaan Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja

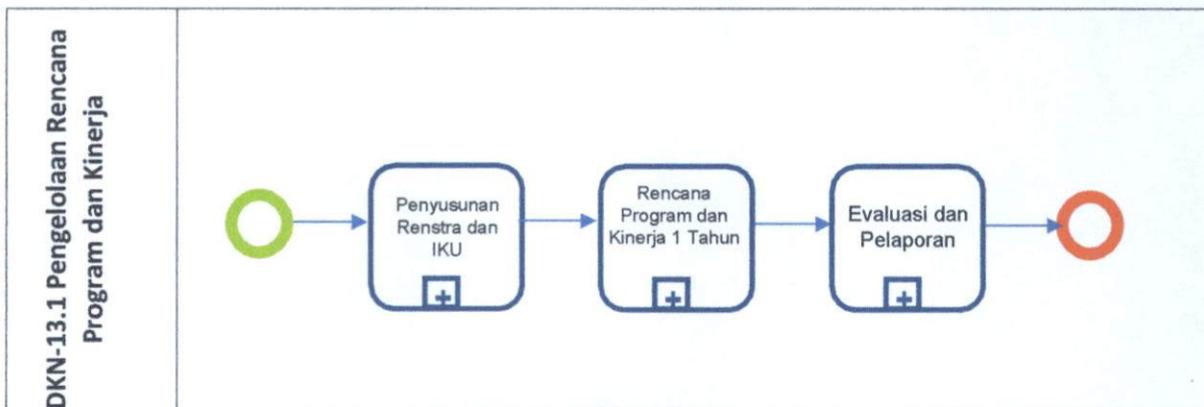
SUB PROSES BISNIS LEVEL 1 DKN-13 PENGELOLAAN PERENCANAAN DAN AKUNTABILITAS KINERJA



Pemetaan Sub Proses Bisnis Level 1 DKN-13 Pengelolaan Perencanaan dan Akuntabilitas tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam sub proses bisnis level 2 tersebut dibawah ini:

- a. Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-13.1 Pengelolaan Rencana Program dan Kinerja.

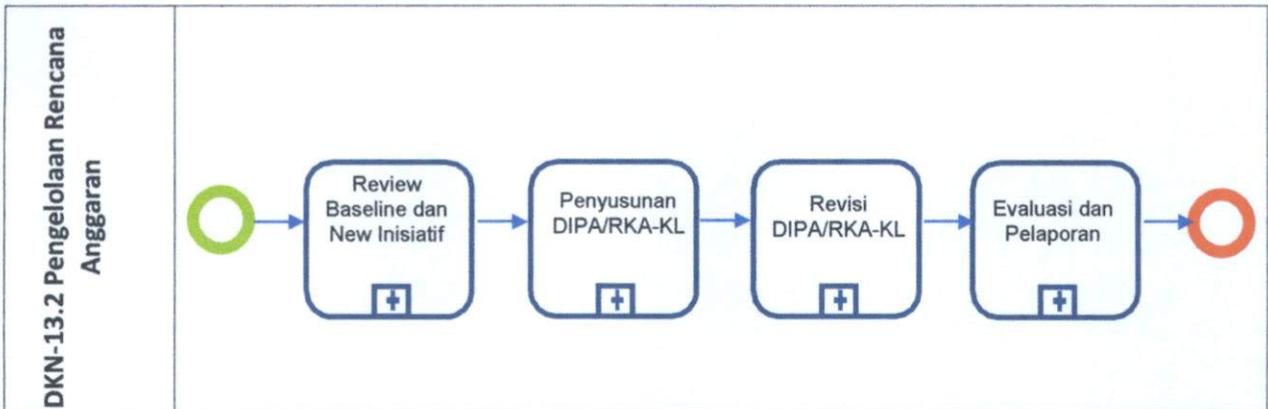
SUB PROSES BISNIS LEVEL 2 DKN-13.1 PENGELOLAAN RENCANA PROGRAM DAN KINERJA



Masing-masing kegiatan dalam tahapan pengelolaan perencanaan dan akuntabilitas tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

b. Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-13.2 Pengelolaan Rencana Anggaran.

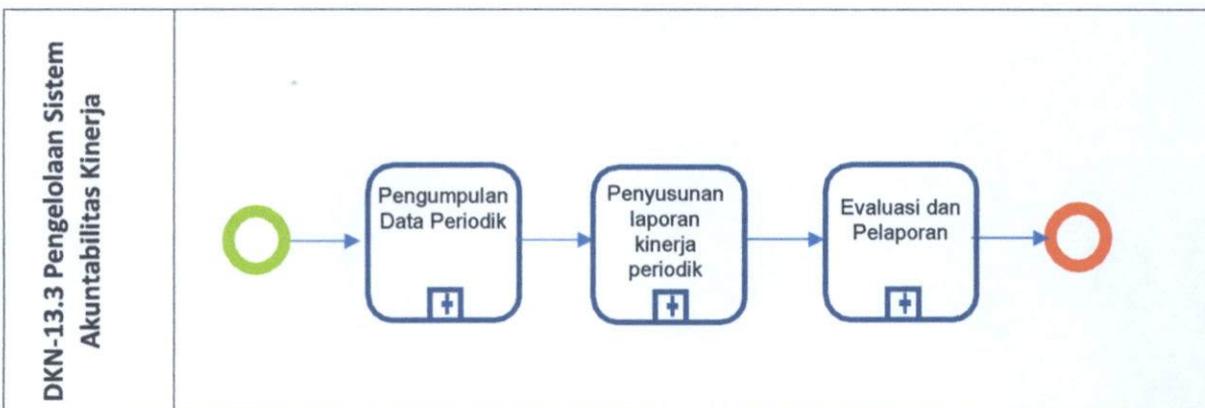
**SUB PROSES BISNIS LEVEL 2 DKN-13.2
PENGELOLAAN RENCANA ANGGARAN**



Masing-masing kegiatan dalam tahapan pengelolaan rencana anggaran tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

c. Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-13.3 Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja.

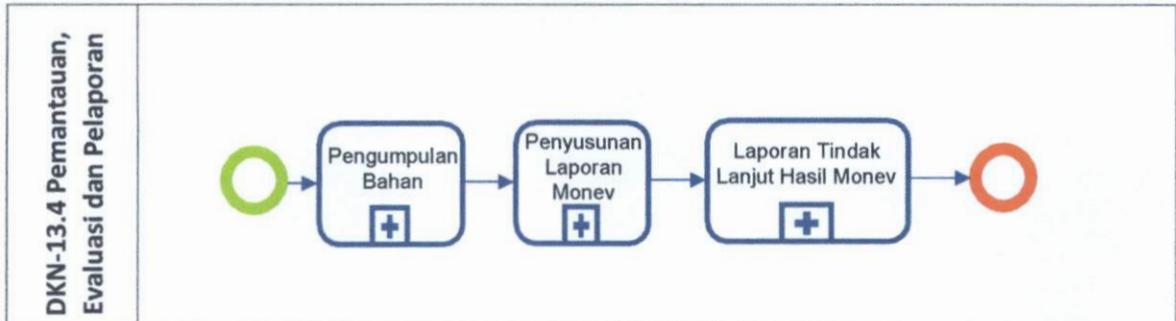
**SUB PROSES BISNIS LEVEL 2 DKN-13.3
PENGELOLAAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA**



Masing-masing kegiatan dalam tahapan pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

- d. Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-13.4 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

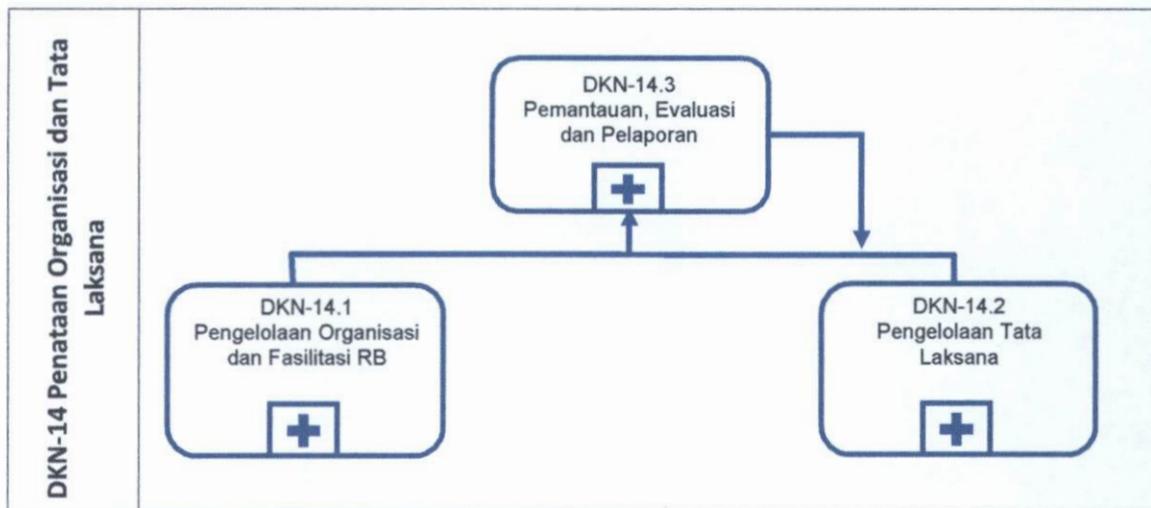
**SUB PROSES BISNIS LEVEL 2 DKN-13.4
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**



Masing-masing kegiatan dalam tahapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

14. Sub Proses Bisnis Level 1 DKN-14 Penataan Organisasi dan Tata Laksana

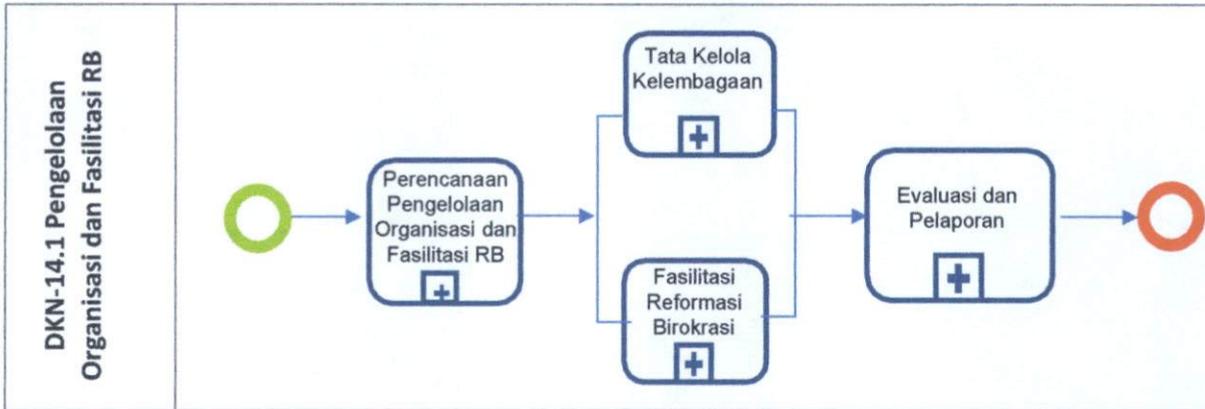
**SUB PROSES BISNIS LEVEL 1 DKN-14
PENATAAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA**



Pemetaan Sub Proses Bisnis Level 1 DKN-14 Penataan Organisasi dan Tata Laksana tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam sub proses bisnis level 2 tersebut dibawah ini:

- a. Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-14.1 Pengelolaan Organisasi dan Fasilitas RB.

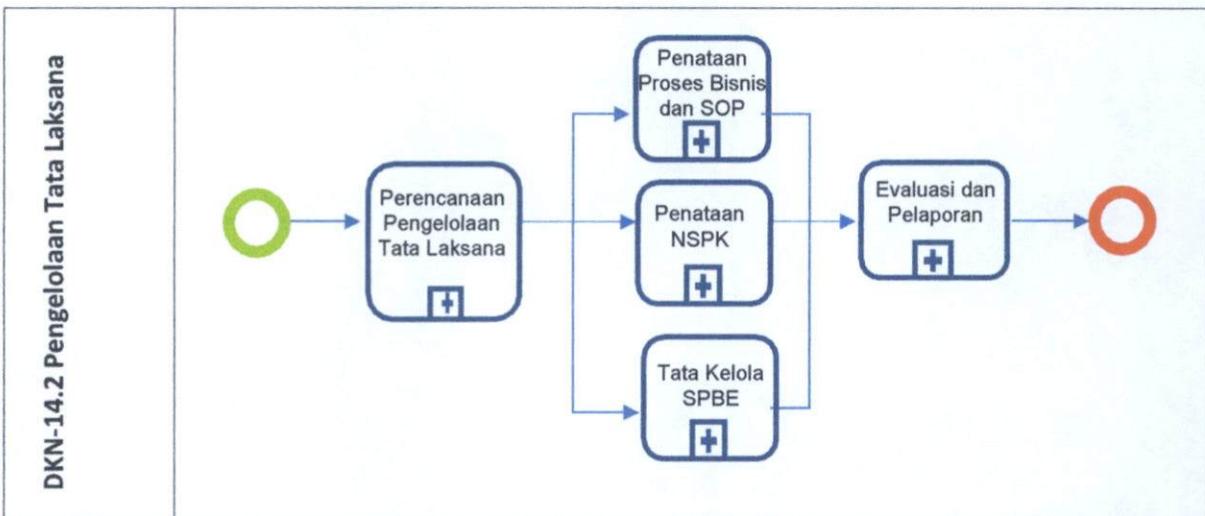
**SUB PROSES BISNIS LEVEL 2 DKN-14.1
PENGELOLAAN ORGANISASI DAN FASILITASI RB**



Masing-masing kegiatan dalam tahapan pengelolaan organisasi dan fasilitas RB tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

- b. Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-14.2 Pengelolaan Tata Laksana.

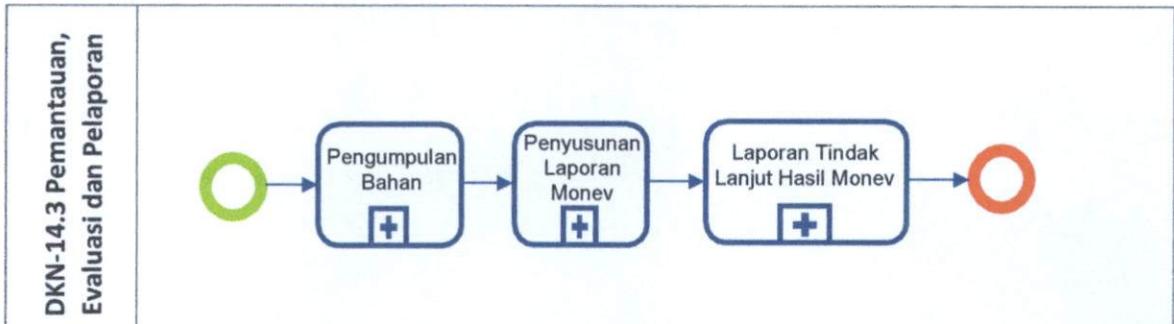
**SUB PROSES BISNIS LEVEL 2 DKN-14.2
PENGELOLAAN TATA LAKSANA**



Masing-masing kegiatan dalam tahapan pengelolaan tata laksana tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

- c. Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-14.3 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

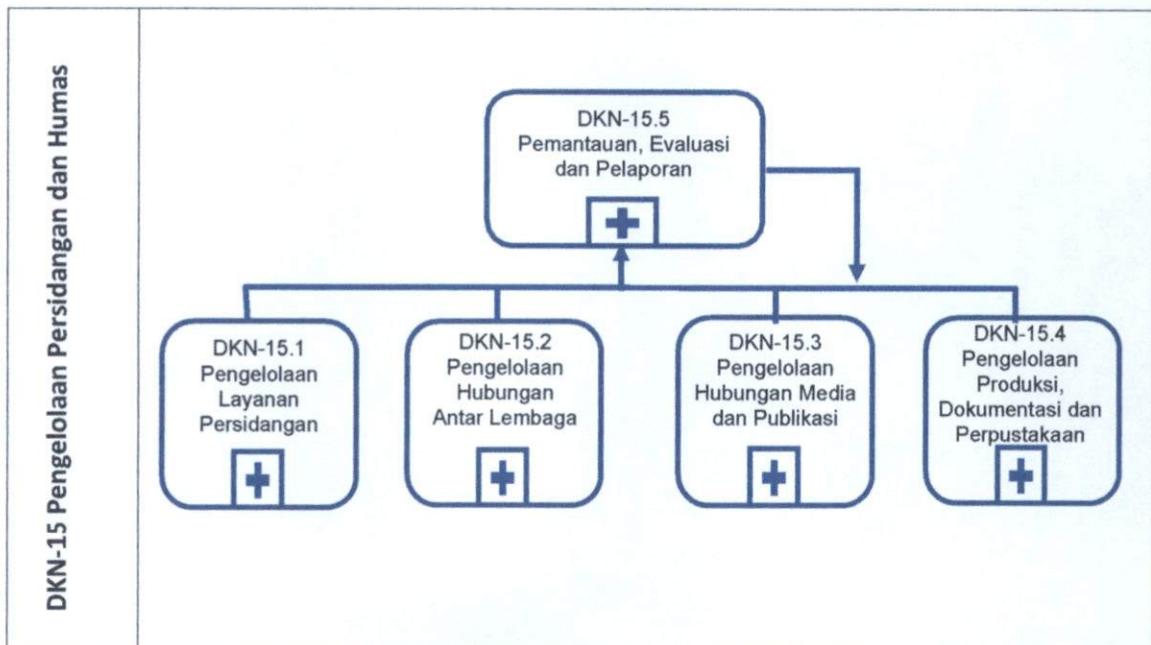
**SUB PROSES BISNIS LEVEL 2 DKN-14.3
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**



Masing-masing kegiatan dalam tahapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

15. Sub Proses Bisnis Level 1 DKN-15 Pengelolaan Persidangan dan Humas

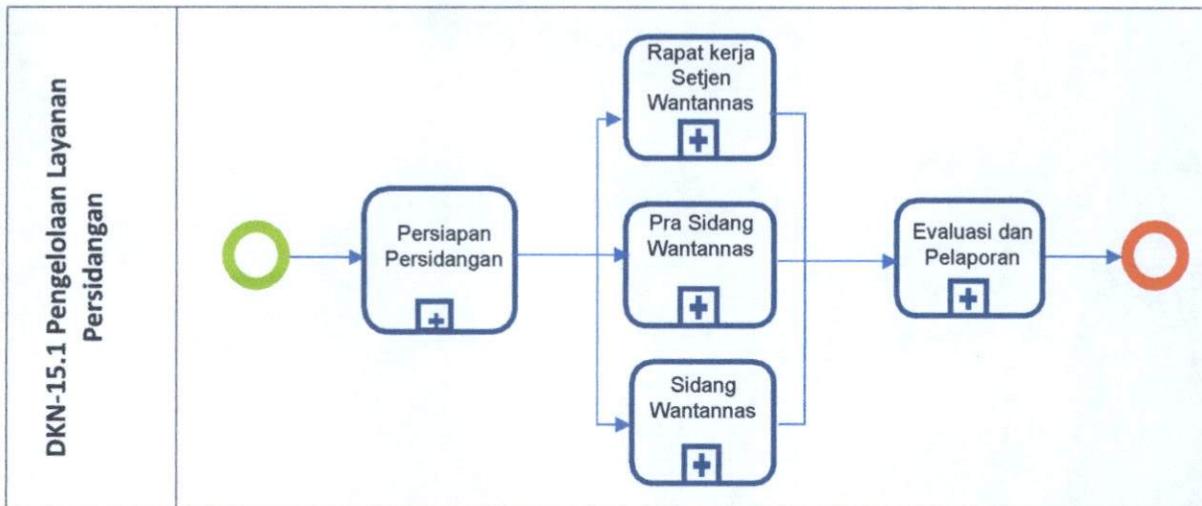
**SUB PROSES BISNIS LEVEL 1 DKN-15
PENGELOLAAN PERSIDANGAN DAN HUMAS**



Pemetaan Sub Proses Bisnis Level 1 DKN-15 Pengelolaan Persidangan dan Humas tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam sub proses bisnis level 2 tersebut dibawah ini:

- a. Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-15.1 Pengelolaan Layanan Persidangan.

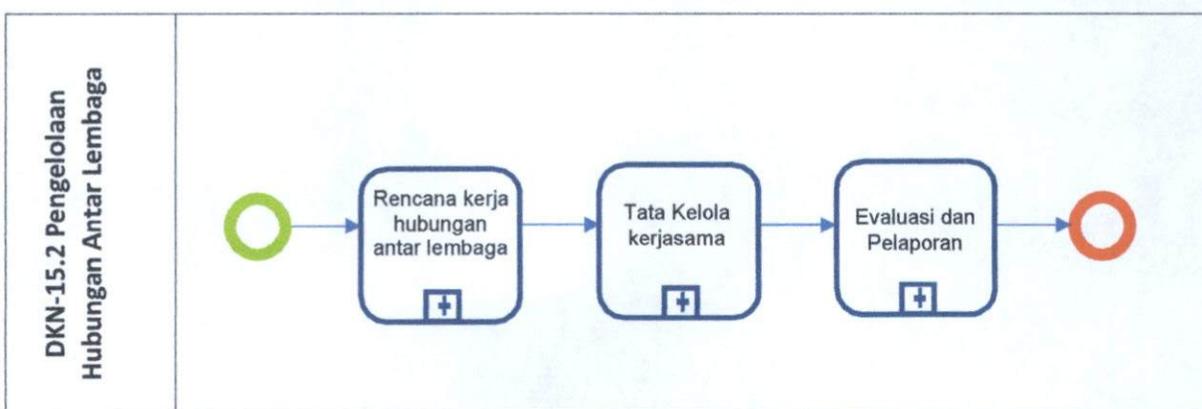
**SUB PROSES BISNIS LEVEL 2 DKN-15.1
PENGELOLAAN LAYANAN PERSIDANGAN**



Masing-masing kegiatan dalam tahapan pengelolaan layanan persidangan tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

- b. Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-15.2 Pengelolaan Hubungan Antar Lembaga.

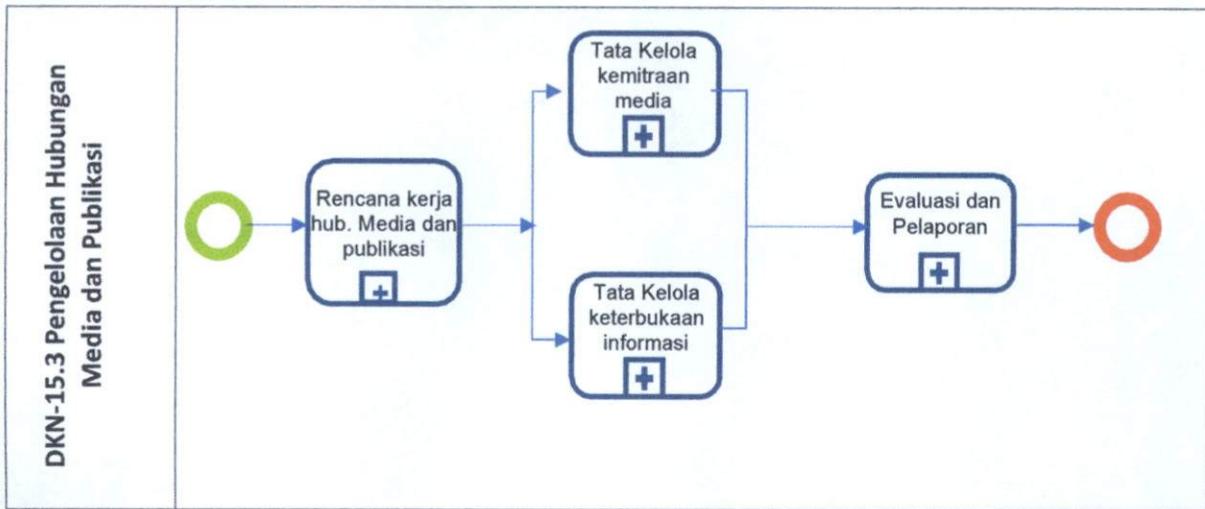
**SUB PROSES BISNIS LEVEL 2 DKN-15.2
PENGELOLAAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA**



Masing-masing kegiatan dalam tahapan pengelolaan hubungan antar lembaga tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

- c. Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-15.3 Pengelolaan Hubungan Media dan Publikasi.

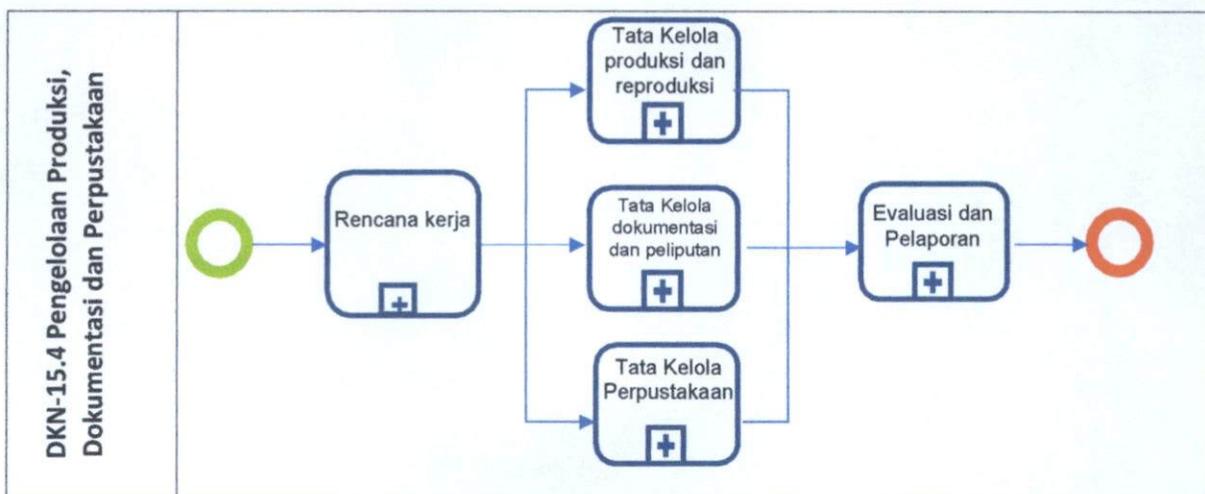
**SUB PROSES BISNIS LEVEL 2 DKN-15.3
PENGELOLAAN HUBUNGAN MEDIA DAN PUBLIKASI**



Masing-masing kegiatan dalam tahapan pengelolaan hubungan media dan publikasi tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

- d. Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-15.4 Pengelolaan Produksi, Dokumentasi dan Perpustakaan.

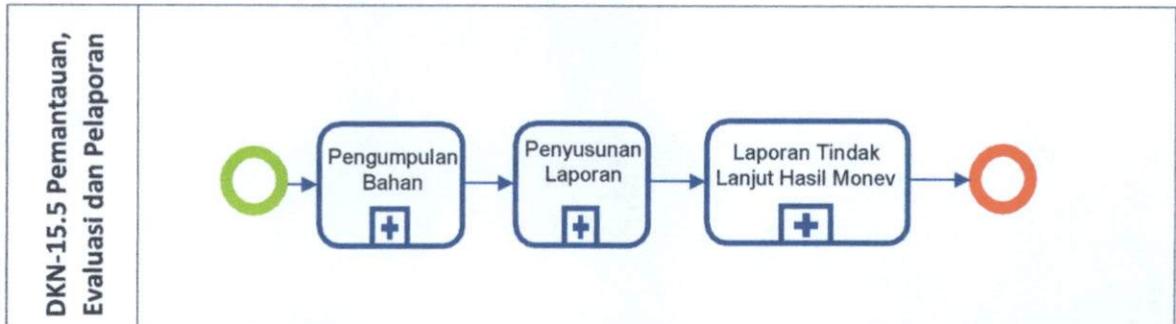
**SUB PROSES BISNIS LEVEL 2 DKN-15.4
Pengelolaan Produksi, Dokumentasi dan Perpustakaan**



Masing-masing kegiatan dalam tahapan pengelolaan produksi, dokumentasi dan perpustakaan tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

- e. Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-15.5 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

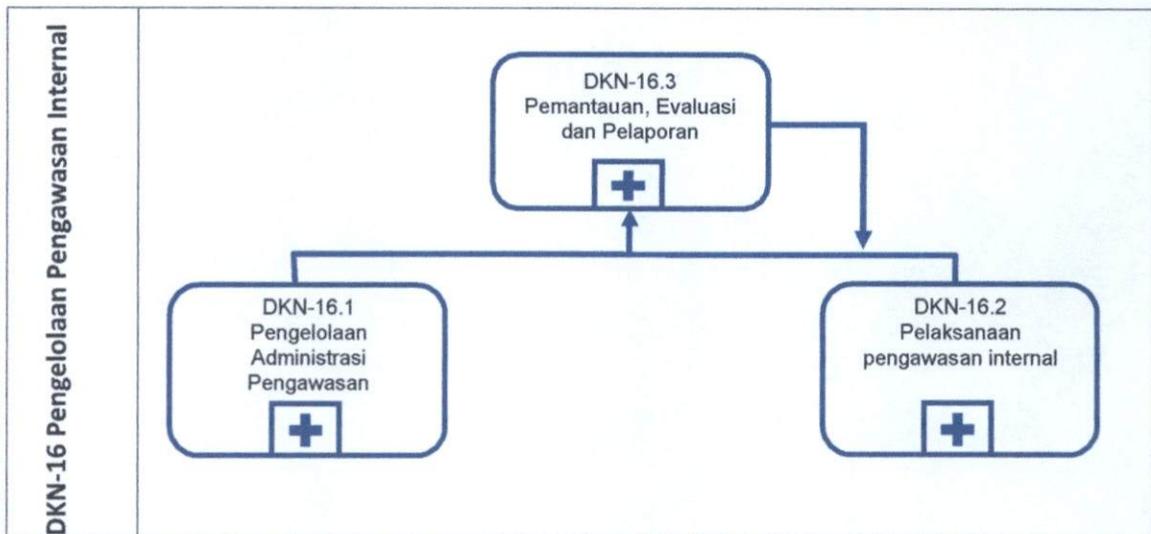
**SUB PROSES BISNIS LEVEL 2 DKN-15.5
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**



Masing-masing kegiatan dalam tahapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

16. Sub Proses Bisnis Level 1 DKN-16 Pengelolaan Pengawasan Internal

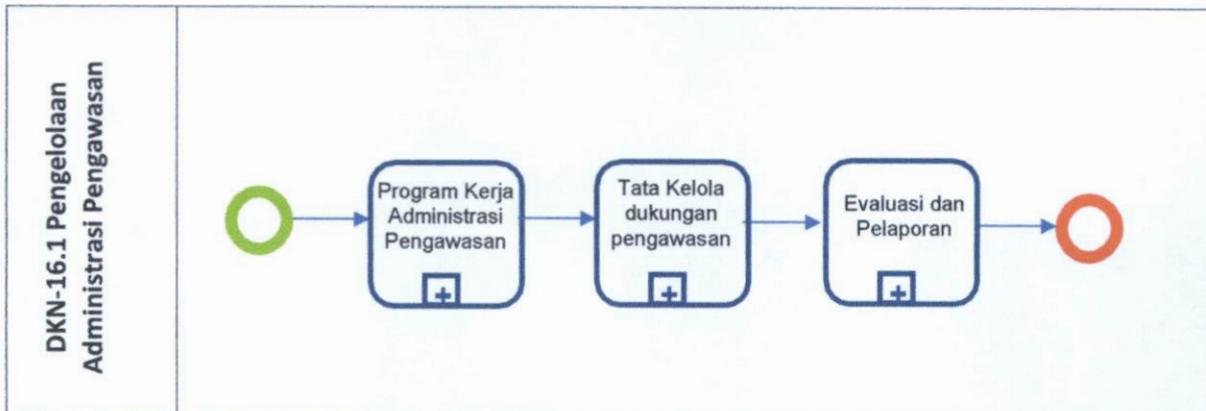
**SUB PROSES BISNIS LEVEL 1 DKN-16
PENGELOLAAN PENGAWASAN INTERNAL**



Pemetaan Sub Proses Bisnis Level 1 DKN-16 Pengelolaan Pengawasan Internal tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam sub proses bisnis level 2 tersebut dibawah ini:

- a. Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-16.1 Pengelolaan Administrasi Pengawasan.

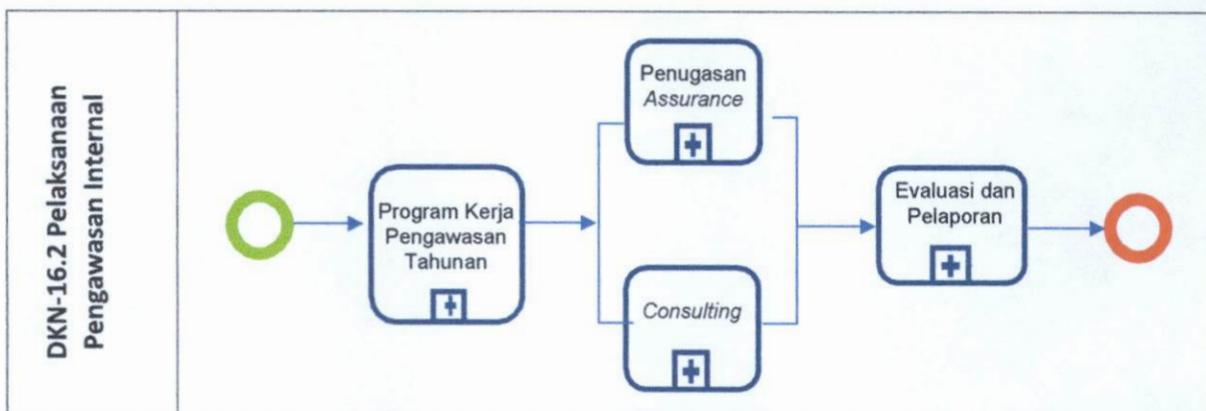
**SUB PROSES BISNIS LEVEL 2 DKN-16.1
PENGELOLAAN ADMINISTRASI PENGAWASAN**



Masing-masing kegiatan dalam tahapan pengelolaan administrasi pengawasan tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

- b. Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-16.2 Pelaksanaan Pengawasan Internal.

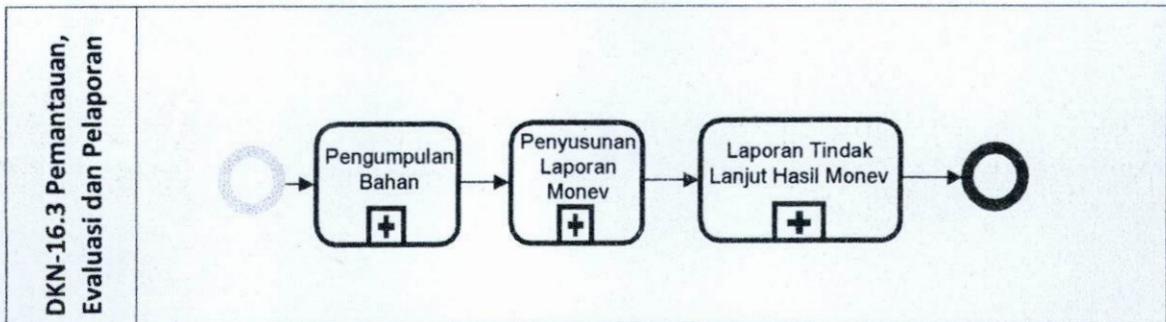
**SUB PROSES BISNIS LEVEL 2 DKN-16.2
PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL**



Masing-masing kegiatan dalam tahapan pelaksanaan pengawasan internal tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

- c. Sub Proses Bisnis Level 2 DKN-16.3 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

**SUB PROSES BISNIS LEVEL 2 DKN-16.3
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**



Masing-masing kegiatan dalam tahapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dalam bentuk SOP.

Ditetapkan di J a k a r t a
Pada tanggal 25 Januari 2022

DEWAN KETAHANAN NASIONAL RI
SEKRETARIS JENDERAL,



HARJO SUSMORO